

LAKIP 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah



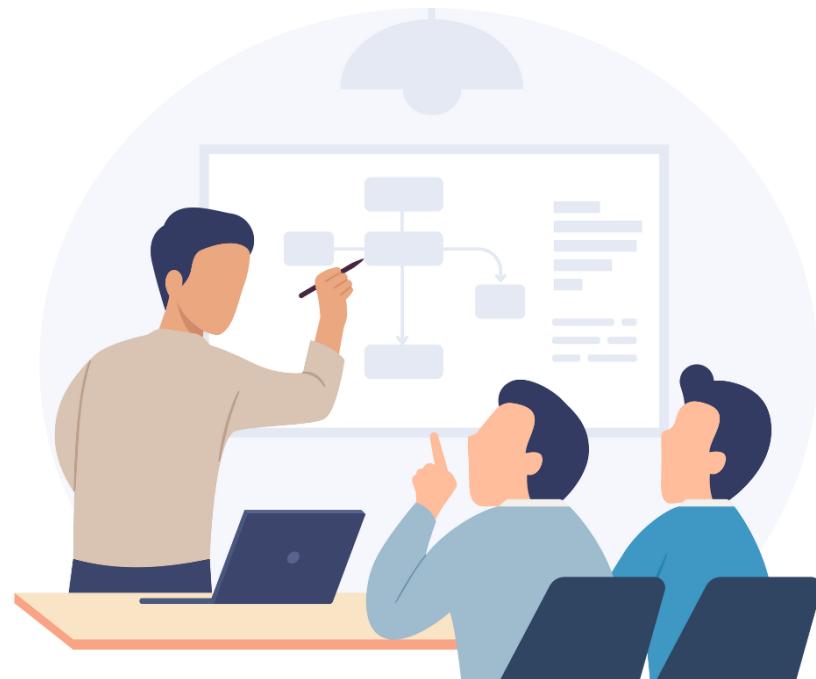
**INSPEKTORAT
Kabupaten Polewali Mandar**

Ikhtisar Eksekutif

Pengukuran pelaksanaan kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selama Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana sasaran strategis yang direncanakan mampu direalisasikan.

Pengukuran kinerja ini pada dasarnya menilai capaian terhadap target yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi faktor keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Hasil pengukuran dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan/misi organisasi selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud penerapan prinsip pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum, capaian kinerja yang telah ditargetkan untuk setiap sasaran maupun kegiatan dapat dicapai dengan baik. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 mencapai 98,74%, atau berada pada kategori cukup baik. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Inspektorat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.





Kata Pengantar

Penyusunan laporan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2024, sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 serta dokumen penetapan kinerja tahunan.

Laporan ini menyajikan gambaran mengenai capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan sebagai tindak lanjut perbaikan. Harapannya, LAKIP ini tidak hanya menjadi dokumen formal pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan refleksi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LAKIP Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kinerja organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Inspektur

H. Ahmad Saifuddin, SH.,MM., CGCAE
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 200003 1 084



Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar dan Diagram.....	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan	2
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan.....	4
1.4 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	4
1.5 Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Polewali Madar	6
1.5.1 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	7
1.5.2 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	7
1.5.3 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	7
1.5.4 Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Pengawasan	8
1.5.5 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Polewali Mandar	10
2.1.2 Visi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.....	10
2.1.3 Misi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.....	11
2.1.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	11
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	12
2.2.1 Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.....	14
2.2.2 Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	18
2.2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	18
2.3 Instrumen Pendukung Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Akuntabilitas Kinerja.....	22
3.1.1 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	22
3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	31
3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perencanaan Kinerja	35
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	38
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Langkah Perbaikan Kedepan.....	42
4.2.1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).....	42
4.2.2 Pemanfaatan Teknologi Digital.....	42
4.2.3 Penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	42



4.2.4 Peningkatan Kolaborasi dan Koordinasi.....	42
4.2.5 Fokus pada Hasil (Outcome-Oriented).....	43
LAMPIRAN.....	44



Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	12
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024.	13
Tabel 2. 4 Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis pada Renstra Perangkat Daerah	18
Tabel 3. 1 Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Tahun 2024.....	23
Tabel 3. 2 Tabel Unsur Penilaian SPIP Pendekatan Kuantitatif.....	25
Tabel 3. 3 Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	25
Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1.....	31
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Indikator Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP dalam 2 Tahun Terakhir.....	31
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra	32
Tabel 3. 7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2.....	32
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Presentase Tingkat Kapabilitas APIP Dalam 2 Tahun Terakhir	32
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra	33
Tabel 3. 10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3.....	33
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder Dalam 2 Tahun Terakhir	33
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra	33
Tabel 3. 13 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4.....	34
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP perangkat Daerah dalam 2 Tahun Terakhir	34
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra	34
Tabel 3. 16 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5.....	35
Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Indikator Opini Pengelolaan Keuangan dalam 2 Tahun Terakhir	35
Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra	35
Tabel 3. 19 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	36
Tabel 3. 20 Program Penyelenggaraan Pengawasan	36
Tabel 3. 21 Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi	37
Tabel 3. 22 Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2024	38



Daftar Gambar dan Diagram

Gambar 1. 1 Daftar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ..	4
Gambar 1. 2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.....	5
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	6
Gambar 2. 1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	14
Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	15
Gambar 2. 5 Perkembangan Capaian Indikator dari Tahun 2019-2023	17
Gambar 2. 6 . Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.....	19

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.....	45
Lampiran 2	Pohon Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar 2024.....	78
Lampiran 3	Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar 2024.....	92
Lampiran 4	Evaluasi Internal Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar 2024.....	96
Lampiran 5	Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Triwulan I-IV Tahun 2024.....	102
Lampiran 6	Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Triwulan I-IV Tahun 2024.....	106
Lampiran 7	Cascading SAKIP Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.....	110
Lampiran 8	Cascading SAKIP Administrasi Umum.....	113
Lampiran 9	Rencana Aksi Inspektorat 2024.....	117

BAB I

PENDAHULUAN



INSPEKTORAT
Kabupaten Polewali Mandar





1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme semakin menguat dari waktu ke waktu. Kondisi ini menuntut setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, untuk tidak hanya melaksanakan program dan kegiatan semata, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan mampu memberikan hasil nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak lagi dipandang sebatas kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas, pemerintah mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Melalui sistem ini, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi. Bagi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, penyusunan LAKIP merupakan bagian integral dari upaya memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 dan dokumen penetapan kinerja tahunan. Laporan ini juga berfungsi sebagai media untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta solusi yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Penyusunan LAKIP tidak hanya didasarkan pada kebutuhan internal organisasi, tetapi juga merupakan amanat dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa regulasi penting yang menjadi landasan antara lain Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut mempertegas kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya, pencapaian sasaran, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, serta menilai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Lebih jauh, LAKIP Tahun 2024 diharapkan menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan yang mendorong Inspektorat untuk meningkatkan akuntabilitas,

memperkuat fungsi pengawasan, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan sebagai bentuk pelaporan kinerja sekaligus pertanggungjawaban organisasi atas keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Inspektorat sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019–2024 serta dokumen penetapan kinerja tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
2. Sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar.
3. Memberikan acuan dan landasan dalam menentukan skala prioritas program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu lima tahun.
4. Menjabarkan keterkaitan antara Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024, sehingga tercipta keselarasan antara tujuan organisasi dan arah pembangunan daerah.
5. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pelaporan, serta kedudukan dan tugas perangkat daerah. Dasar hukum ini menjadi pijakan normatif sekaligus pedoman dalam setiap tahapan penyusunan LAKIP, sehingga laporan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Selain itu, keberadaan dasar hukum ini juga memastikan bahwa penyusunan LAKIP dilaksanakan secara konsisten, selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah, serta mendukung terwujudnya prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result oriented government).

Adapun dasar hukum penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Daftar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten di bidang pengawasan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai perangkat daerah, Inspektorat memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Inspektorat diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021.



Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar memiliki struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021. Struktur ini menggambarkan susunan jabatan, hubungan koordinasi, serta alur pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Inspektorat. Melalui pengaturan tersebut, setiap unit kerja diharapkan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara terintegrasi guna mendukung efektivitas fungsi pengawasan.

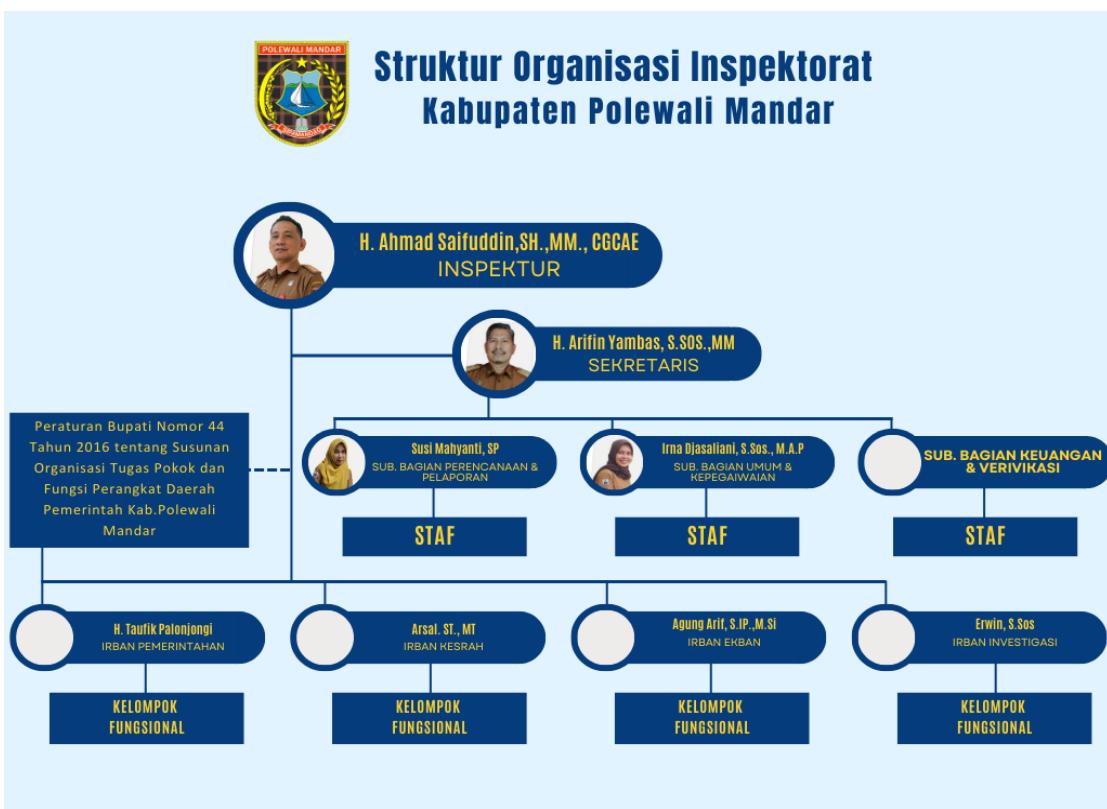
Adapun susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas:

1. Sekretaris, yang membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Investigasi;
3. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan;
4. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; serta



6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambaran koordinasi antar komponen dalam struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar ditunjukkan secara lebih rinci pada **Gambar 1.3**. Dengan susunan organisasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar diharapkan mampu melaksanakan perannya secara optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

1.5 Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Polewali Madar

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengawasan. Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat melakukan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah, seperti Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis daerah. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya maupun lembaga pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan oleh APIP tingkat yang lebih tinggi, seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi, dilaksanakan sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan/atau atas permintaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan prinsip sinergi pengawasan. Pada dasarnya, lembaga pengawasan di atas Inspektorat hanya memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pengecualian berlaku bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawasan eksternal yang memiliki kewenangan penuh terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan lima tahun terakhir serta proyeksi ke depan, baik dari aspek internal maupun eksternal, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan. Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program prioritas Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut:

1.5.1 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP menambah fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019–2024, ditargetkan pada tahun 2023 Inspektorat sudah mencapai level 3 kapabilitas APIP. Evaluasi terbaru menunjukkan hasil penilaian maturitas SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP, yaitu: SPIP-T dengan skor 3,000; MRI dengan skor 3,958; serta IEPK dengan skor 3,448 (hasil QA BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024). Capaian ini perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi.

1.5.2 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan SPIP di setiap perangkat daerah masih tergolong lemah. Hal ini ditunjukkan oleh temuan berulang, baik oleh Inspektorat maupun BPK, serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif. Oleh karena itu, Inspektorat perlu mendorong terbangunnya SPIP yang efektif pada setiap perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selain itu, APIP juga dituntut untuk melakukan penilaian maturitas SPIP dengan target mencapai level 3 dari skala 1–5 pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2019–2024.

1.5.3 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah adalah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tantangan ke depan adalah mempertahankan opini WTP tersebut secara konsisten dalam lima tahun mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perhatian serius dari seluruh pemangku

kepentingan agar peran Inspektorat, khususnya dalam melaksanakan reviu laporan keuangan, dapat berjalan optimal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5.4 Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Pengawasan

Jumlah SDM bidang pengawasan yang tersedia saat ini masih terbatas untuk melaksanakan pemeriksaan reguler, penanganan kasus, maupun berbagai tugas pengawasan lainnya yang bersifat mandatory, seperti reviu dan evaluasi. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM di bidang pengawasan. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan melaksanakan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak bagi pengembangan SDM pengawasan agar mampu beradaptasi dengan dinamika pengelolaan pemerintahan yang semakin kompleks.

1.5.5 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Kinerja Inspektorat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, kondisi sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar saat ini masih jauh dari standar ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang layak agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



INSPEKTORAT
Kabupaten Polewali Mandar





2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Polewali Mandar

Visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kabupaten Polewali Mandar merupakan representasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi tersebut menjadi gambaran cita-cita serta harapan masyarakat yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

“Polewali Mandar Maju, Mandiri, dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas wilayah, pengembangan ekonomi daerah, serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Polewali Mandar yang agamis, bermoral, berbudaya, berpendidikan, inovatif, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki etos kerja yang tinggi.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, perbaikan taraf hidup, peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan profesionalisme dan dedikasi aparatur, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta penataan mekanisme kerja dan lingkungan kerja guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.2 Visi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Sejalan dengan visi dan misi daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menetapkan visi organisasi yang tertuang dalam **Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2019–2024**, yaitu:

“Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional, Berkualitas, Transparan, dan Terpercaya.”

Visi ini menggambarkan komitmen Inspektorat untuk mengantisipasi berbagai tantangan, perkembangan, dan tuntutan masyarakat, serta mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam mendukung proses pembangunan daerah. Peningkatan kinerja dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil serta menekan potensi kebocoran keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Visi ini disusun agar selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional maupun daerah, khususnya yang tercantum dalam **RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024**. Selain itu, visi ini menjadi pedoman dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan arah tindakan, serta menjadi acuan bagi setiap unit kerja dan individu di lingkungan Inspektorat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

2.1.3 Misi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menetapkan misi organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat aparatur pemerintah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan sistem evaluasi dan menindaklanjuti hasil pengawasan secara konsisten.

Misi ini mencerminkan upaya nyata Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar untuk memperkuat peran dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, misi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode perencanaan strategis.

2.1.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menetapkan tujuan strategis sebagai arah pencapaian dalam periode perencanaan. Tujuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis yang bersifat lebih terukur.

Tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah :



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Visi : Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional, Berkualitas, Transparan dan Terpercaya			
No	Tujuan	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP
		Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2024

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2024 ditetapkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024. Penetapan kinerja ini menjadi dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat serta sekaligus sebagai pedoman dalam evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka memastikan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada keluaran (output).

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Menyediakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menyusun indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024. Adapun indikator dimaksud ditampilkan pada **Tabel 2.2** berikut.



Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Percentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	$n = \frac{\text{Jumlah OPD yg Menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Sekertariat
2.	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	$n = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Auditor}}{\text{Jumlah JFA berkompeten bid. pengawasan}} \times 100\%$	Sekertariat
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Hasil Penilaian	Sekertariat
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian	Sekertariat
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	Hasil Pemeriksaan BPK RI	Sekertariat

Selanjutnya, untuk memperjelas capaian yang ditargetkan pada Tahun 2024, disajikan pula Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 2.3** berikut.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024.

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Percentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	13,64%	20,45%	27,27%	31,82%	38,64%	45,45%	45,45%	45,45%
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3						
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
5.	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sebagai tindak lanjut dari penetapan indikator kinerja yang tertuang dalam **Tabel 2.2** dan **Tabel 2.3**, diperlukan sebuah gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan. Visualisasi ini



dimaksudkan untuk menyatukan arah pencapaian kinerja jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019–2024 dengan target tahunan yang ditetapkan pada tahun 2024.

Untuk itu, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menyajikan bagan integrasi indikator kinerja utama yang ditampilkan pada **Gambar 2.1**. Bagan ini memberikan ilustrasi yang lebih jelas mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai beserta indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilannya.



Gambar 2. 1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

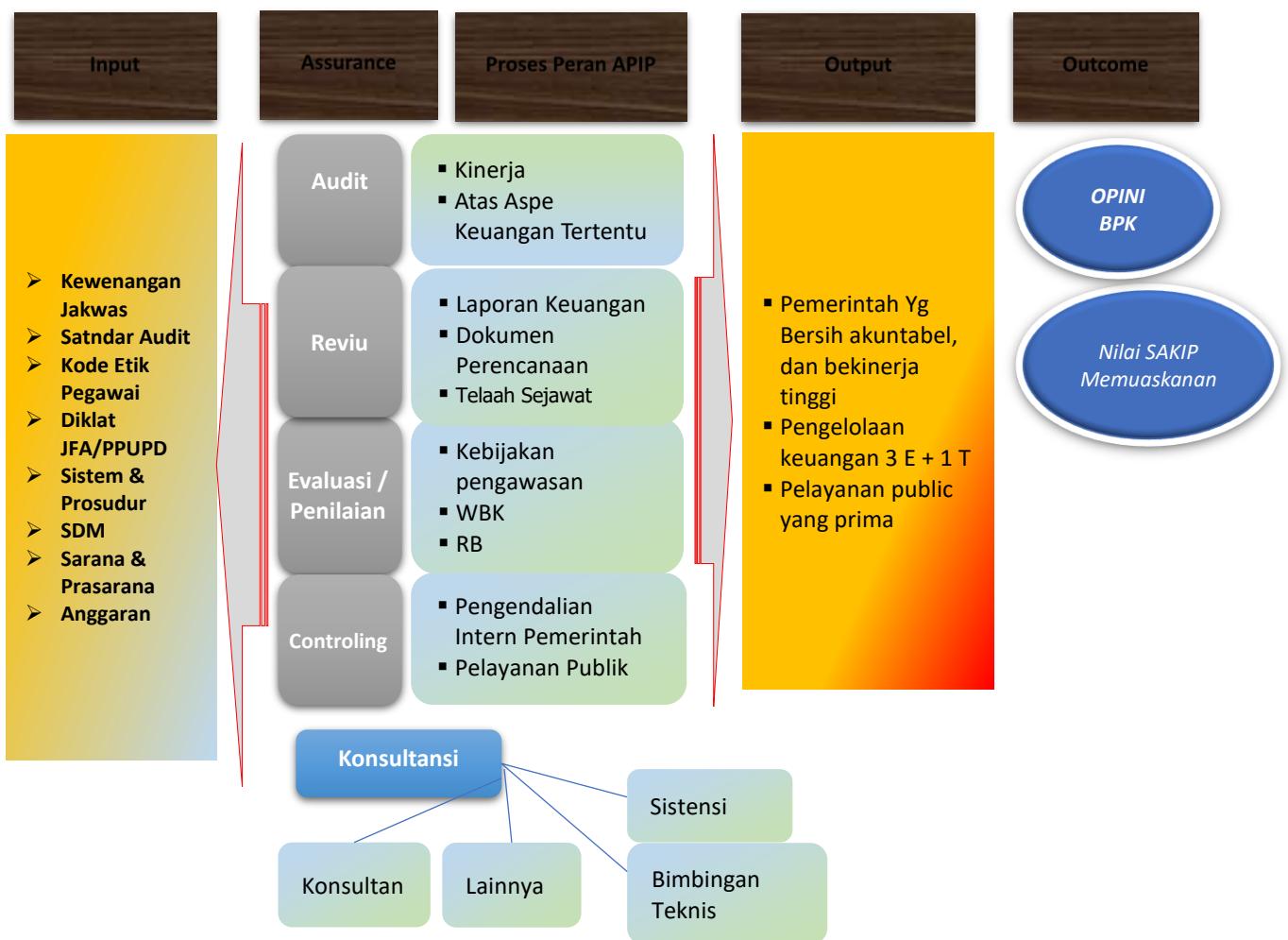
2.2.1 Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Pelaksanaan pengawasan tidak dapat dilepaskan dari proses bisnis Inspektorat yang menjadi kerangka kerja utama. Proses ini meliputi tahapan input, assurance, peran APIP, output, hingga outcome yang ingin dicapai. Melalui audit, reviu, evaluasi, penilaian,



controlling, dan konsultansi, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Proses Bisnis Inspektorat



Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai koridor hukum, Inspektorat Daerah memiliki dasar pijakan yang kuat. Landasan operasional perumusan proses bisnis didasarkan pada berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Bagan (**Gambar 2.3**) berikut menjelaskan dasar hukum serta misi Inspektorat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan modern.



Gambar 2. 3 Landasan Operasional Pelaksanaan Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Keterkaitan antara visi daerah, misi pembangunan, serta tujuan Inspektorat dituangkan dalam cascading kinerja(**Gambar2.4**). Hubungan ini menggambarkan bagaimana arah pembangunan daerah dituangkan ke dalam program pengawasan Inspektorat hingga indikator kinerja yang spesifik. Dengan demikian, setiap sasaran kinerja dapat ditelusuri akuntabilitasnya dari tingkat daerah hingga unit kerja.



Gambar 2. 4 Cascading Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar



Sebagai bentuk konkret pelaksanaan kinerja, ditetapkan sejumlah indikator, sasaran, dan program pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat. Bagan (Gambar 2.5) berikut menggambarkan perkembangan capaian indikator dari tahun ke tahun, meliputi kualitas manajemen perkantoran, akuntabilitas satuan kerja, kepuasan masyarakat, predikat SAKIP, serta opini pengelolaan keuangan. Struktur kelembagaan dan peran masing-masing bidang juga mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut.



Gambar 2. 3 Perkembangan Capaian Indikator dari Tahun 2019-2023



2.2.2 Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang di dalamnya memuat program, kegiatan dan seluruh target kerja yang hendak dicapai dalam setahun yang akan datang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci yang meliputi indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 2. 4 Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis pada Renstra Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Percentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	persen	20,45	27,27	31,82	38,64	38,64	45,45
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Skor	B	B	BB	BB	BB	A
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

2.2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar merupakan dokumen formal yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Dokumen ini menjadi dasar komitmen Inspektorat dalam meningkatkan kualitas pengawasan, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan daerah. Pada bagan berikut ditampilkan ringkasan sasaran strategis beserta indikator

kinerja utama dan target capaian tahun 2024, sedangkan uraian lengkap mengenai perjanjian kinerja Inspektorat secara resmi dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Adapun target perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 2. 4 . Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Perjanjian kinerja Inspektorat memuat sasaran strategis yang ingin dicapai beserta indikator kinerja dan target tahunannya. Melalui perjanjian kinerja ini, Inspektorat berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), memperkuat kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), serta meningkatkan kualitas manajemen perkantoran, akuntabilitas satuan kerja, dan pengelolaan keuangan OPD. Setiap sasaran telah ditetapkan indikator pengukurannya yang spesifik, seperti persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP, tingkat kapabilitas APIP, indeks kepuasan masyarakat, predikat SAKIP, hingga opini pengelolaan keuangan. Dengan adanya target yang jelas, perjanjian kinerja ini menjadi dasar pengendalian dan evaluasi atas capaian kinerja Inspektorat.

2.3 Instrumen Pendukung Tahun 2024

Dalam rangka mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar memanfaatkan berbagai instrumen yang berfungsi sebagai sarana integrasi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja. Keberadaan instrumen ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam mewujudkan pengelolaan kinerja yang lebih transparan, terukur, dan akuntabel.

Instrumen pendukung ini tidak hanya berperan sebagai alat bantu administratif, tetapi juga menjadi media kontrol dan evaluasi kinerja yang memungkinkan setiap unit kerja di Inspektorat untuk melaksanakan tugasnya secara lebih efektif dan terarah. Dengan demikian, capaian sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja dapat dipantau secara berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar perbaikan apabila terdapat deviasi antara target dan realisasi.

Adapun instrumen pendukung penerapan SAKIP di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 meliputi:

1. simkinerja2022.polman.go.id → aplikasi yang mendukung implementasi SAKIP melalui pengukuran, pemantauan, dan pelaporan kinerja organisasi.
2. sipd.polman.go.id → aplikasi yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan, rencana kerja tahunan, dan alokasi anggaran.
3. (*Instrumen lainnya dapat ditambahkan sesuai kebutuhan, misalnya aplikasi pengawasan internal, aplikasi keuangan, atau perangkat monitoring kinerja OPD*).

Melalui pemanfaatan instrumen-instrumen tersebut, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar diharapkan mampu memperkuat integrasi sistem manajemen kinerja, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih optimal.

Dengan adanya instrumen pendukung tersebut, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar memiliki landasan yang lebih kuat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan. Pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai aplikasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan kinerja. Ke depan, pemutakhiran dan optimalisasi penggunaan instrumen ini akan terus dilakukan agar sejalan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan organisasi, serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang bersih, profesional, dan berorientasi hasil.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



**INSPEKTORAT
Kabupaten Polewali Mandar**



3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Polewali Mandar yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan serta target dan dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dipaparkan pula keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, terdapat 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja berserta terget kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja tersebut, maka diperlukan pengukuran kinerja yang akan dibahas, dievaluasi dan dianalisis dalam BAB ini. Laporan dimaksud diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian target indikator masing-masing sasaran, perkembangan atau perbandingan kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target serta aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masing-masing sasaran.

3.1.1 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap)



yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang memperlihatkan hasil yang cukup baik.

1. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan monitoring Sistem Penerapan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap sejumlah perangkat daerah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Tahun 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kriteria	Skor
1	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan persandian	Terdefinisi	3,831
2	Dinas transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM	Terdefinisi	3,586
3.	Inspektorat	Terdefenisi	3,780
4	Dinas Kesehatan	Terdefenisi	3807



No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kriteria	Skor
5	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Terdefinisi	3,826
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terdefinisi	3,794
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terdefenisi	3,743
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdefinisi	3,853
9	Dinas Sosial	Terdefinisi	3,838
10	Dinas Perimahan, Permukiman dan Pertanahan	Terdefenisi	3,850
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terdefenisi	3,817
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Terdefenisi	3,780
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terdefenisi	3,844
14	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	Terdefenisi	3,839
15	Dinas Pertanian dan pangan	Terdefenisi	3,838
16	Sekretaris Dewan	Terdefenisi	3,806
17	Dinas Perhubungan	Terdefenisi	3,804
18	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Terdefenisi	3,796
19	Badan Pendapatan	Terdefenisi	3,769
20	Badan Keuangan	Terdefenisi	3,756
21	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Terdefenisi	3,756
22	Sekretariat Daerah	Terdefenisi	3,749
23	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Terdefenisi	3,724
24	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan	Terdefenisi	3,702
25	Dinas Keautan dan perikanan	Terdefenisi	3,688
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terdefenisi	3,605
27	Dinas Pemuda olah raga dan pariwisata	Terdefenisi	3,825
28	Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan	Terdefenisi	3,813

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan evaluasi atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Dua Puluh Delapan (28) organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tujuan sebagai berikut :

- A. Menilai penyelenggaraan SPIP pada organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Polewali Mandar.
- B. Memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi bahwa penyelenggaraan kegiatan yang efisien, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap perundang- undangan.
- C. Memberikan saran perbaikan kepada Pimpinan Instansi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan SPIP pada organisasi perangkat daerah (OPD).



Untuk mencapai tujuan tersebut penilaian penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan ruang lingkup penilaian yang meliputi lima (5) unsur dan dua puluh lima (25) sub unsur SPIP yaitu :

1. Lingkup Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Penilaian penyelenggaraan SPIP pada Organisasai Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dengan pendekatan kuantitatif mengacu pada 25 sub unsur penyelenggaraan SPIP yaitu :

Tabel 3. 2 Tabel Unsur Penilaian SPIP Pendekatan Kuantitatif

No	Unsur SPIP	Jumlah Sub Unsur	Bobot
1	Lingkup Pengendalian	8	30%
2	Penilaian Risiko	2	20%
3	Kegiatan Pengendalian	11	25%
4	Informasi dan Komunikasi	2	10%
5	Pemantauan	2	15%
Jumlah		25	

Simpulan hasil penilaian tingkat maturisasi penyelenggaraan SPIP dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil skor akhir untuk masing-masing fokus penilaian (sub unsur) dengan gradasi nilai sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Kategori Maturitas	Level Maturitas	Interval Nilai
Belum ada	0	0 < Skor/Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Skor/Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Skor/Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Skor/Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 ≤ Skor/Nilai < 4,5
Optimum	5	4,5 ≤ Skor/Nilai < 5,0

Dari hasil penilaian tingkat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kabupaten Polewali Mandar dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP di kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi kriteria “terdefinisi” dan sudah ada 3 (tiga) OPD yang telah mencapai kategori “terkelola dan

terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan cukup baik. Namun masih ditemukan berbagai kelemahan atas komitmen penyelenggaraan SPIP, untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pemenuhan parameter sebagai indikator dari penerapan SPIP itu sendiri. Kelemahan-kelemahan ini disebabkan berbagai macam faktor antara lain:

1. Minimnya anggaran yang dialokasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Sumber daya manusia masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan evaluasi dilaksanaan oleh satu tim pengawasan terhadap beberapa OPD. Sehingga hal ini mengakibatkan masih banyaknya parameter yang belum maksimal dilakukan akibat dari keterbatasan waktu pelaksanaan evaluasi.

Capaian sasaran terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 di 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten Polewali Mandar sebesar 31,11 %.

B. Tingkat Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamatkan didalam PP nomor 60 Tahun 2008 supaya seluruh tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif.

Hal ini dipertegas oleh Presiden Republik Indonesia pada rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan tema Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta. Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 berada pada Level 3 (Integrated), jika dinilai dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) tahun 2009. Sebagaimana diketahui dalam kerangka Internal Audit Capability Model (IACM) kapasitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh Internal Audit Capability Model (IACM) yaitu Internal Audit Capability Model (IACM) dan telah disesuaikan seperlunya yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing)
2. Pengelolaan SDM (People Management)
3. Praktek Profesional (Professional Practices)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Managementand Accountability)
5. Budaya dan hubungan organisasi (Organizational Relationship anf Culture)
6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)

Tingkat kapabilitas APIP yang telah diraih oleh Inspektorat kabupaten Polewali Mandar telah mencapai pada tingkat Level 3 (Integrated). Hal ini telah diperoleh sejak tahun 2019, Sampai 2020 Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar berhasil memperhankan tingkat kapabilitas APIP pada tingkat Level 3 (Integrated).

C. Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder

Masyarakat membutuhkan pelayanan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Demikian pula pada Inspektorat kabupaten Polewali Mandar yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepuasan terhadap layan masyarakat/ stakeholder. Kepuasan ini dapat terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan atau lebih baik dari standar pelayanan tersebut.

Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha daerah lainnya dalam mewujudkan Good Governance. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016.

Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga terjadi pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi penyelenggara layanan disebut dengan istilah complain handing system yang sejalan dengan Keputusan Prisiden telah meninstruksikan kepada setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola penagaduan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Inspektorat kabupaten Polewali Mandar telah mencapai kategori “baik” dalam hal pelayanan publik, karena telah disediakan Standar Pelayanan Operasional dalam penanganan pelayanan publik. Dan setiap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksaasn khusus dalam penanganan pengaduan.

Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengaduan masih terdapat kelemahan yang disebabkan oleh sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar seperti :

1. Kondisi gedung kantor Inspektorat kabupaten Polewali Mandar sudah tidak layak huni dan perlu perbaikan secara maksimal agar masyarakat/stakeholder yang berkunjung ke Inspektorat kabupaten Polewali Mandar dapat merasa nyaman dalam menyampaikan inspirasi.
2. Anggaran yang masih sangat terbatas, sehingga pengaduan masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun kadang tidak dapat ditindak lanjuti segera. Hal ini disebabkan karena anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut tidak memadai.
3. Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang telah dibuat belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan karena SDM yang ada di Inspektorat kabupaten Polewali Mandar masih kurang memadai.

D. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kabupaten Polewali Mandar sejak dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 telah memperoleh predikat “BB” dengan persentase penilaian sebesar 72,16% atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian RB yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 05 April 2022. Dan pada penilaian tahun 2023, kabupaten Polewali

Mandar kembali memperoleh predikat “BB” dengan persentase penilaian sebesar “72,04” yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 November 2023. Secara umum tujuan dilaksanakan evaluasi penilaian SAKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implemetasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

E. Opini Pengelolaan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah atau badan lain, diberi kewenagan untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang kemudian memuat opini antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (disclaimer of opinion). Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1), yaitu : Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemberian opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Efektivitas Pengendalian Intern;
3. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
4. Pengungkapan yang Lengkap (Full Disclosure).

Keempat kriteria pemeriksaan di atas akan berdampak terhadap opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.



Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdersnya (publik/ masyarakat).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemeritah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas (LAK) dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
6. Laporan Arus Kas (LAK) dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaksanaan Akuntansi keuangan daerah tersebut diperlukan keahlian khusus dibidang akuntansi yang ditunjang dengan program aplikasi komputer

(SIMDA dan SIPD)) yang handal serta dipayungi dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yang kemungkinan akan lebih menghambat dalam memperoleh Opini WTP karena diperlukan sumberdaya yang memahami Akuntansi Berbasis Akrual.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merupakan predikat yang telah disandang secara berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Sejak audit terhadap LKPD Polewali Mandar tahun 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya, opini BPK atas LKPD Polewali Mandar masih pada predikat Wajar Dengan Pengecualian. Pada saat itu predikat WTP masih tersandung oleh karena penyajian data laporan asset yang belum mampu meyakinkan tim auditor BPK RI kala itu.

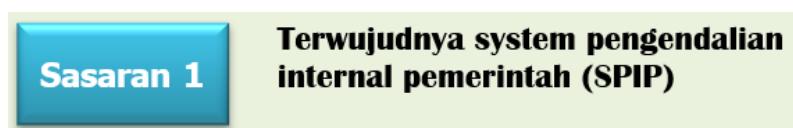
Opini WDP ini juga akan memberi kontribusi yang besar terhadap penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Polewali Mandar, selain itu opini WTP juga menjadi potensi untuk mendapatkan reward berupa peningkatan nilai Dana Insentif Daerah.



Meskipun mendapatkan opini WDP bukan berarti bahwa pada saat Tim Auditor melakukan audit terhadap LKPD Polewali Mandar sama sekali tidak terdapat temuan- temuan. Akan tetapi temuan-temuan tersebut lebih pada hal-hal yang bersifat administratif, tidak ada temuan yang secara material menyebabkan kerugian negara/daerah

3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

A. Sasaran Strategis 1



Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian sasaran tersebut sebesar 98,36 %. Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:



Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP		45,45%	98,36 %	100%

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Indikator Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	45,45%	95,4%	100%	45,45%	98,36%	100 %



Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya system pengendalian internal pemerintah (APIP)	Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	45,45%	95,4%	100%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilaksanakan. Realisasi kinerja untuk indikator ini 95,4% dari target yang direncanakan namun nilai capaianya 100.% sama dari tahun sebelumnya.

B. Sasaran Strategis 2

Sasaran 2

Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian sasaran tersebut 3.00. Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 2

Tingkat Kapabilitas APIP

Tabel 3. 7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Presentase Tingkat Kapabilitas APIP Dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00	3.00	3,00	3,00



Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00

C. Sasaran Strategis 3

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian sasaran tersebut Baik Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 3

Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder

Tabel 3. 10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja		Target		Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder		Baik		Baik	Baik

Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder Dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Terpenuhi	Baik	Baik	Terpenuhi

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik



D. Sasaran Strategis 4

Sasaran 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian sasaran tersebut BB Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 4

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3. 13 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian	
Predikat SAKIP Perangkat Daerah		BB		BB		BB	

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP perangkat Daerah dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	Terpenuhi	BB	BB	Terpenuhi

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB



E. Sasaran Strategis 5

Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian sasaran tersebut WTP Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 5

Opini Pengelolaan Keuangan

Tabel 3. 16 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Opini Pengelolaan Keuangan		WTP	WDP	WDP

Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Indikator Opini Pengelolaan Keuangan dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP

Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP

3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perencanaan Kinerja

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 telah berupaya mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :



A. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3. 19 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	Terpenuhi
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Terpenuhi

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , target kinerja dan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 100. % dengan anggaran Rp 6.627.650.594,-.. Adapun realisasi anggaran untuk program ini yaitu 98,74% atau Rp 6.544.121.667,- dengan capaian kinerja sebesar 99,8 %.

Adapun Kegiatan-Kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah.
6. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Tabel 3. 20 Program Penyelenggaraan Pengawasan

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP	94,02 %	45,45 %	95,4%	95,4 %
2	Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP



Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, target kinerja dan anggaran untuk tahun 2024.. sebesar dengan anggaran Rp 1,522.006.020,- Adapun realisasi anggaran untuk program ini Rp 1.497.061.950,- dengan capaian kinerja sebesar 98,36 %

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi

Tabel 3. 21 Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	BB	BB	BB	BB

Pada Program Perumusan kebijakan,Pendampingan dan asistensi .target kinerja dan anggaran untuk tahun 2024 dengan anggaran Rp 5.164.800,- Adapun realisasi anggaran untuk program ini yaitu 85,46,% atau Rp 4.413.900,-dengan capaian kinerja sebesar 85,46%

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Program Perumusan kebijakan,Pendampingan dan asistensi adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
2. Pedampingan dan asistensi.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi belanja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 sebesar Rp 6.627.650.594,- Dari jumlah tersebut terealisasi atau 98,75% sebesar Rp 6.544.121.667 dari alokasi belanja yang dianggarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
I	BELANJA	5.100.479.774	5.042.645.817,-	57.833.957	98.87
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.380.260	9.380.260	-	100.00
2	Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.262.057.018	4.227.512.322,-	34.544.696	99.19
3	Belanja Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.032.800	139.654.170	378.630	99.73
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.236.230	301.704.775	2.431.455	99.20
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	289.940.366	270.031.290	19.909.076	93.13
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.777.100	89.207.000	570.100,-	99.36
II	BELANJA	1.522.006.020	1.497.061.950	24.944.070,-	98.36
Program Penyelenggaraan Pengawasan					
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.242.752.610	1.218.413.550.	24.339.270	98.04
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	278.253.410	278.648.410	605.000	99,78
III	BELANJA	5.164.800	4.413.900	750.900	85.46
Program Pengawasan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi					
1	Perumusan Kebijakan Teknis Ibadang Pengawasan & Fasilitas Pengawasan	-	-	-	-
2	Pendampingan Dan Asistensi	5.164.800	4.413.900	750.900	85.46
BELANJA I + II + III		6.627.650.594	6.544.121.667	83.528.927	98.74



Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Inspektorat kabupaten polewali mandar cukup baik karena mampu menyerap anggaran sebesar Rp 6.627.650,594,- dari alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp 6.544.121.667,- dengan penurunan penyerapan anggaran sebesar 98,74.. % dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023.. penyerapan anggaran sebesar 98,68%. Pada tahun ini ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak dapat terserap dengan baik. Hasil analisis keuangan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar diperoleh persentase kurang dari 100% dari target yang direncanakan. Untuk Belanja diperoleh persentase sebesar 98,74.%.

BAB IV

PENUTUP



**INSPEKTORAT
Kabupaten Polewali Mandar**



4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip Good Governance. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi kinerja Inspektorat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2024 mencapai 98,74%, yang merupakan rata-rata dari seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diperjanjikan di awal tahun. Beberapa capaian yang menonjol antara lain: IKU Sasaran 1 sebesar 31,82%; IKU pertama Sasaran 2 pada Level 3; IKU Sasaran 3 dengan predikat Baik; IKU Sasaran 4 dengan predikat BB; serta IKU Sasaran 5 yang memperoleh nilai WDP. Pencapaian tersebut mencerminkan upaya serius Inspektorat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas layanan pengelolaan kinerja.

Dalam menghadapi berbagai kendala pada Semester I Tahun 2024, Inspektorat terus mengedepankan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan serta melakukan perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan. Melalui proses identifikasi dan pemetaan risiko di lingkungan Inspektorat, langkah-langkah perbaikan telah disusun sebagai panduan dalam meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi serta memastikan keberhasilan layanan kepada para pemangku kepentingan.

Selain itu, pengelolaan manajemen Inspektorat juga diarahkan pada integrasi berbagai elemen, seperti sistem pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan pelaporan. Sejalan dengan rekomendasi Kementerian PANRB, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkala. Penguatan e-government dilakukan melalui penyempurnaan sistem informasi yang telah diimplementasikan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja serta memperkuat fungsi organisasi dalam mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Ke depan, tantangan utama yang dihadapi adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, Inspektorat diharapkan dapat menghasilkan outcome yang lebih bermanfaat, baik dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas, maupun dalam memberikan dukungan manajemen kepada pimpinan daerah.



Dengan demikian, Laporan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024 ini diharapkan tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk melakukan penyempurnaan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

4.2 Langkah Perbaikan Kedepan

Meskipun capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan peningkatan di masa mendatang.

Beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

4.2.1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

4.2.2 Pemanfaatan Teknologi Digital.

Inspektorat akan memperkuat penerapan e-government dengan memaksimalkan sistem informasi kinerja, pelaporan, dan pengawasan berbasis digital, sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

4.2.3 Penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peningkatan efektivitas SPIP menjadi prioritas untuk memastikan setiap kegiatan dan program berjalan sesuai dengan ketentuan, serta meminimalisir potensi penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

4.2.4 Peningkatan Kolaborasi dan Koordinasi.

Diperlukan penguatan sinergi antar-unit kerja, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, sekaligus memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.



4.2.5 Fokus pada Hasil (Outcome-Oriented).

Perbaikan ke depan juga akan diarahkan pada pencapaian hasil yang lebih berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, bukan hanya pada pemenuhan output administrasi semata.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat peran pengawasan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Inspektur

H. Ahmad Saifuddin, SH.,MM., CGCAE

Pangkat. Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 200003 1 084

LAMPIRAN



**INSPEKTORAT
Kabupaten Polewali Mandar**





Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA 2024

**INSPEKTORAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

*Jalan Pameran., Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201, KodePos 91314
E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Drs.MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : Pj.Bupati Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

Drs.MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM

Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	31,82%	53,45%
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan asset Perangkat Daerah	98,68%	100%
		Indeks Kepuasan Penggunaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Sangat Baik

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.884.089.606,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.416.933.580,-	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 12.290.800,-	APBD
JUMLAH		Rp 7.313.313.986,-	

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
 BUPATI POLEWALI MANDAR,

Drs.MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

PIHAK PERTAMA
 INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19651231 200003 1 084



Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Penegendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapakan SPIP

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut :

INTERVAL SKOR

- Nilai $1,00 \leq$ Skor $< 2,00$: Rintisan
- Nilai $2,00 \leq$ Skor $< 3,00$: Berkembang
- Nilai $3,00 \leq$ Skor $< 4,00$: Terdefinisi
- Nilai $4,00 \leq$ Skor $< 4,50$: Terkelola dan Terukur
- Nilai $\geq 4,50$: Optimum

Komponen Peniaian :

		Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%
2.	Struktur dan Prose	30%
3.	Pencapaian Tujuan	30%
4.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP
5.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)
6.	Nilai Indek Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPEK)

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan Hasil Audit APIP yang diteruskan ke unit kerja didokumentasikan dan dibuatkan rencana mitigasi risiko untuk menghilangkan kejadian korupsi/perilaku koruptif di unit kerja di masa yang akan datang (temuan tidak berulang di kemudian hari).	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai $1,00 \leq$ Skor $< 2,00$: Rintisan - Nilai $2,00 \leq$ Skor $< 3,00$: Berkembang - Nilai $3,00 \leq$ Skor $< 4,00$: Terdefinisi - Nilai $4,00 \leq$ Skor $< 4,50$: Terkelola dan Terukur - Nilai $\geq 4,50$: Optimum 	Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Penegendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapakan SPIP	53,45%	Jumlah Perangkat daerah yang menjadi sampel atas penilaian Maturitas SPIP yang mencapai Level-3 (Terdefenisi) terhadap jumlah seluruh perangkat daerah kab.polewali mandar.



Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Berkompoten Dalam Bidang Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,

Indikator Kineria

Tingkat Kapabilitas APIP

Dengan hubungan Kapabilitas APIP dengan SPIP terintegrasi, dengan dukungan (**ENABLER**)/dukungan pengawasan, (**DELIVERY**)/Aktivitas pengawasan, (**RESULT**)/Kualitas Pengawasan dengan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan (**Integrated**)

1. Dukungan Pengawasan (Enabler) (60%)

- | | |
|---------------------------------------------|-------|
| - Pengelolaan SDM (30%) | |
| - Praktik Profesional (30%) | |
| - Akuntabilitas Dan Manajemen Kinerja (10%) | |
| - Budaya Dan Hubungan Organisasi (10%) | |
| - Struktur Tata Kelola (20%) | |

Skor

2. Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) (40%)

.....

Pengawasan (Result)

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Berkompoten Dalam Bidang Pengawasan	telah dilaksanakan penginputan dan pemenuhan seluruh unsur elemen penilaian Mandiri yang dilakukan oleh TimInspektorat dapat memenuhi unsur penilaian hingga level 3 (tiga) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP.	Dukungan Pengawasan (Enabler) (60%) - Pengelolaan SDM (30%) - Praktik Profesional (30%) - Akuntabilitas Dan Manajemen Kinerja (10%) - Budaya Dan Hubungan Organisasi (10%) - Struktur Tata Kelola (20%) - Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) (40%)	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,

Target Kineria

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Predikat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil atas proses penjaminan Kualitas (Quality Assurance) oleh BPKP terhadap proses pengembangan Kapabilitas APIP.



Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organisasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Inspektorat
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Hasil Penilaian	Sekretariat Inspektorat

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	Target SAKIP predikat BB tahun 2023 optimis diraih Inspektorat, dengan melihat Capaian SAKIP Inspektorat dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2020 (Predikat BB;), tahun 2021 (Predikat BB) dan tahun 2022 (predikat BB)
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	100%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2020 (98,57%), 2021 (98,73%) serta 2022 (95,99%)
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Inspektorat yang, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM 2020 (Predikat Baik;), 2021 (Predikat Baik;) serta 2022 (Predikat Baik;). Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predikat sangat baik tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran, Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428) 21201 / Faks.(0428) 21201, KodePos 91314

E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website :Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten

Polewali Mandar Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali

Mandar Selakuatasan pihak pertama, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP 19701229 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan - Jumlah penyelesaian Tindak Lanjut dan Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat 	95.4% - 38 LHP - 21 LHR - 2 LHR 16 LHP - 41 LHP - 5 Dok	100% - 41 LHP - 21 LHR - 2 LHR - 24 LHP - 41 LHP - 5 Dok
		B. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelesaian kerugian Negara yang ditindaklanjuti - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 	82,99% 3 LHP 34 LHP-	100% 3 LHP - 36 LHP
		C. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah - Jumlah dokumen Asistensi, verifikasi Penegakan Integritas yang tersedia 	86,20% 1 Dok -1 Dok	100% - 1 Dok - 1 Dok



<p>2.</p> <p>Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan</p>	<p>Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor dan Penjenjangan 	<p>96,1%</p> <p>- 5 org</p>	<p>100%</p> <p>- 5 org</p>
<p>3.</p> <p>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</p>	<p>A. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang digunakan - Jumlah makan minum yang tersedia - Jumlah jenis cetak dan penggandaan - Jumlah jenis bahan bacaan - Jumlah alat tulis kantor - Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dearah 	<p>99,72%</p> <p>- 6 jenis</p> <p>-2 Jenis</p> <p>- 2 jenis</p> <p>-3 jenis</p> <p>- 17 jenis</p> <p>- 54 laporan</p>	<p>100%</p> <p>- 6 jenis</p> <p>- 2 Jenis</p> <p>- 2 jenis</p> <p>- 3 jenis</p> <p>- 17 jenis</p> <p>- 155laporan</p>
	<p>B. Persentase Tertib Adminitrasi Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jenis Meubeler - Jumlah alat komputer yang tersedia 	<p>100%</p> <p>- 4 jenis</p> <p>- 13 unit</p>	<p>100%</p> <p>- 4 jenis</p> <p>- 13 unit</p>
	<p>C. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola - Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi - Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 	<p>95%</p> <p>- 959 surat</p> <p>- 3 jenis</p> <p>- 1600 meter2</p>	<p>100%</p> <p>- 1300 surat</p> <p>- 3 jenis</p> <p>- 4000 meter2</p>
	<p>D. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi izin 	<p>86%</p> <p>- 7 unit</p>	<p>100%</p> <p>- 7 unit</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah unit peralatan kantor yang terpelihara - Jumlah jenis komputer yang terpelihara 	<p>- 2 unit</p> <p>-8 Unit</p>	<p>-2 Unit</p> <p>- 8 unit</p>



4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standard dan Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Renja/Perubahan Renja Tahunan yang tersusun sesuai standard dan tepat waktu - Jumlah Rencana Kerja Aggaran (RKA) - Jumlah Dokumen Perubahan RKA - Jumlah Laporan LPPD 	100%	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standard dan Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ASN yang masuk dalam daftar gaji/ampra gaji bulanan dalam satu tahun - Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah 	99,9%	100%

NO. 1	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2	ANGGARAN		KET. 4
		3	4	
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Desa - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 	Rp.1.138.576.753,- Rp.398.408.712,- Rp.227.665.440,- Rp. 22.138.892,- Rp. 226.131.536,- Rp.264.341.173,-	APBD APBD APBD APBD APBD	APBD



	B. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp.278.356.827,- Rp. 34.706.115,- Rp.243.650.712,-	APBD APBD
2.	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.258.667.000,- Rp.258.667.000,-	APBD
3.	A. Administarsi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Bahan /Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.230.289.506,- Rp. 25.077.000,- Rp. 21.063.960,- Rp. 4.440.000,- Rp. 23.468.046,- Rp.156.240.500,-	APBD APBD APBD APBD APBD APBD
	B Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.302.196.320,- Rp. 11.685.000,- Rp. 74.600.920,- Rp.215.910.400,-	APBD APBD APBD
	D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.89.970.100,-	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak	Rp.66.719.100,-	APBD



	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp.13.400.000,-	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya - Pemeliharren/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.6.900.000,- Rp.2.951.000,-	APBD APBD
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.9.862.879,- Rp.3.696.954,- Rp.1.556.198,- Rp.2.542.575,- Rp.2.067.152,-	APBD APBD APBD APBD
5.	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah -Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Rp.4.956.863.521,- Rp.4.031.647.748,- Rp. 1.654.210,-	APBD
	JUMLAH	Rp.7.313.313.986,-	

Polewali, 23 februari 2024

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,


H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
S.Sos.,MM

Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,


H. ARIFIN YAMBAS,

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP 19701229 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428)
21201 /Faks. (0428) 21201, KodePos 91314
E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **AGUNG ARIF, S.IP.,M.Si**
Jabatan : Irban Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,

AGUNG ARIF, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP 19700809 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET
			2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	95,4% 	100%
		B. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten - Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	89,99 % 	100%

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah - Pengawasan Keuangan		APBD



	Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Desa		APBD
	B. Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		APBD

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
 INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
 Pangkat :Pembina Utama Muda
 NIP:19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
 IRBAN BID. EKONOMI DAN
 PEMBANGUNAN

AGUNG ARIF, S.I.P.,M.Si
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP: 197008009 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran, Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201,
KodePos 91314

E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRNA DJASLIANA, S.Sos.,M.A.P**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM**
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewa1i, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,

IRNA DJASLIANA,S.Sos.,M.A.P

Pangkat : Penata
NIP ; 19820803 200604 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN INPEKTORAT KAB. POLEWALI MANDAR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan B. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten - Jumlah koordinasi dan Monev yang tersedia - Jumlah dokumen Asistensi, verifikasi Penegakan Integritas yang tersedia	95,4% - 38 LHP 89,99% - 1 Dok - 4 Perangkat Daerah	100% - 41 LHP 100% - 1 dok - 4 Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor - Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor dan Penjengjangna	96,1% - 5 Org	100% - 5 org
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	A. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor - Jumlah makan minum yang tersedia - Jumlah jenis cetak dan penggandaan - Jumlah jenis bahan bacaan - Jumlah alat tulis kantor - Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	95% - 3 jenis - 5 paket - 2 jenis - 3 jenis - 17 jenis - 54 laporan	100% - 3 jenis - 5 paket - 2 jenis - 3 jenis - 17 jenis - 54 laporan



		B. Persentase Tertib Adminitrasi Kantor - Jumlah jenis Meubeler - Jumlah alat komputer yang tersedia	96 % - 2 jenis - 4 unit	100% - 2 jenis - 4 unit
		C. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor - Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola - Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi - Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	86% - 1165 surat - 3 jenis - 1600 meter	100% - 1165 surat - 3 jenis - 1600 meter
		D. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor - Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi izin - Jumlah unit peralatan kantor yang terpelihara - Jumlah jenis komputer yang terpelihara	97% - 7 unit - 2 unit - 8 Unit	100% - 7 unit - 3 unit - 8 unit

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		APBD
2.	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		APBD
3.	A. Administarsi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyedian Barang Cetakan dan		APBD APBD APBD



	Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan /Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		APBD APBD APBD
	C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa SuratMenyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		APBD APBD APBD
	D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya. - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau banguna lainnya		APBD APBD APBD
	JUMLAH		

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

IRNA DJASLIANA, S.Sos.,M.A.P

Pangkat : Penata
NIP 19820803 200604 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428) 21201 /Faks.
(0428) 21201, KodePos 91314

E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H.TAUFIK A.PALONTJONGI,S.IP,M.AdM,KP**

Jabatan : Irban Bidang. Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**

Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA

INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP
NIP : 19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA

IRBAN BIDANG PEMERINTAHAN

H.TAUFIK .PALONTJONGI,S.IP,M.AdM,KP

Pangkat: Pembina Tk.I
NIP : 19690609 199112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428) 21201 /Faks.
(0428) 21201, KodePos 91314

E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.TAUFIK A.PALONTJONGI,S.IP,M.Adm,KP
Jabatan : Irban Bidang. Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA

IRBAN BIDANG PEMERINTAHAN

H.TAUFIK .PALONTJONGI,S.IP,M.Adm,KP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP :19690609 199112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET
			2022	2023
1	2	3	5	
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa B. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 	95,4% -38 LHP - 21 LHR - 2 LHR -16 LHP	100% -41LHP -21 LHR -2 LHR 16 LHP

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.		
			1	2	3
1	2	3	4		
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Desa 				



	B. Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		APBD

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA

INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM

H.TAUFIK .PALONTJONGI,S.IP,M.Adm,KP

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP :19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA

IRBAN BID. PEMERINTAHAN

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP :19690609 199112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan Pameran. No. 12, Kel.Pekkabata, Kec.Polewali Telp.(0428) 21201 /Faks.
(0428) 21201, KodePos 91314

E-mail :inspektoratolmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSIMAHYANTI, SP
Jabatan : Fungsional Perencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
PERENCANAAN DAN PELAPORAN,

SUSIMAHYANTI, SP

Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19730808 2002 1 2 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standard dan Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Renja/Perubahan Renja Tahunan yang tersusun sesuai standard dan tepat waktu - Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) - Jumlah Dokumen Perubahan RKA - Jumlah Laporan LPPD 	- 1 dok - 1 dok - 1 dok - 1 dok	- 1 dok - 1 dok - 1 dok - 1 dok

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	Rp.9.862.879,- Rp.3.696.954,- Rp.1.556.198,- Rp.2.542.575,- Rp.2.067.152,-	APBD APBD APBD APBD
	JUMLAH	Rp.9.862.879,-	

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS,

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos., MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN,

SUAIMAHYANTI, SP

Pangkat : Penata tk. I
NIP : 19730808 200212 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan Pameran, Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428)
21201 /Faks. (0428) 21201, KodePos 91314
E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Verifikasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KABUPATEN

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
Plt. KASUBAG KEUANGAN DAN
VERIFIKASI

Pangkat:
NIP:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASUBAG
KEUANGAN DAN VERIFIKASI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standard dan Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ASN yang masuk dalam daftar gaji/ampra gaji bulanan dalam satu tahun - Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah 	92% - 57 org - 1 dok	100% - 57 org - 1 dok

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 	Rp.4.957.863.521,- Rp.4.956.209.311,- Rp. 1.654.210,- APBD	APBD
	JUMLAH	Rp.4.957.863.521,-	

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KABUPATEN

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos., MM

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
Plt. KASUBAG KEUANGAN DAN
VERIFIKASI

Pangkat:
NIP:



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428) 21201 /Faks. (0428) 21201, KodePos 91314
E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERWIN,S.Sos**
Jabatan : Irban Bidang Investigasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN

AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
IRBAN BIDANG INVESTIGASI

ERWIN, S.Sos
Pangkat: Pembina
NIP: 19700616 199103 1 002



INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET
			2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP - Jumlah Laporan Hasil Pengawaasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa B. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompoten - Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	95,4% -38 LHP - 21 LHR - 2 LHR - 41 LHP	100% -41LHP -21LHR -2 LHR -41 LHP

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		1	2	
1	2	3	4	5
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Desa			APBD APBD APBD APBD APBD



	B. Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		APBD

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN

AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
IRBAN BIDANG INVESTIGASI

ERWIN, S.Sos
Pangkat: Pembina
NIP: 19700616 199103 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran Kel.Darma, Kec.Polewali Telp.(0428) 21201 /Faks.
(0428) 21201, KodePos 91314
E-mail :inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARSAL,ST.MT**
Jabatan : Irban .Bidang Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN

AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
IRBAN BIDANG KESEJAHTERAAN

ARSAL, ST.,MT
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP: 19750725 200312 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET
			2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	95,4% -38 LHP	100% -41LHP
		B. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten - Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	86,20 % -3 Dok	100% - 3 Dok

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		1	2	
1	2	3	4	4
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah - Pengawasan Keuangan			APBD APBD APBD APBD



	Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Desa		APBD
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	------

Polewali, 23 Februari 2024

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN

AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
IRBAN BIDANG KESEJAHTERAAN

ARSAL, ST.,MT

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP: 19750725 200312 1 007

Lampiran 2

Pohon Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar 2024

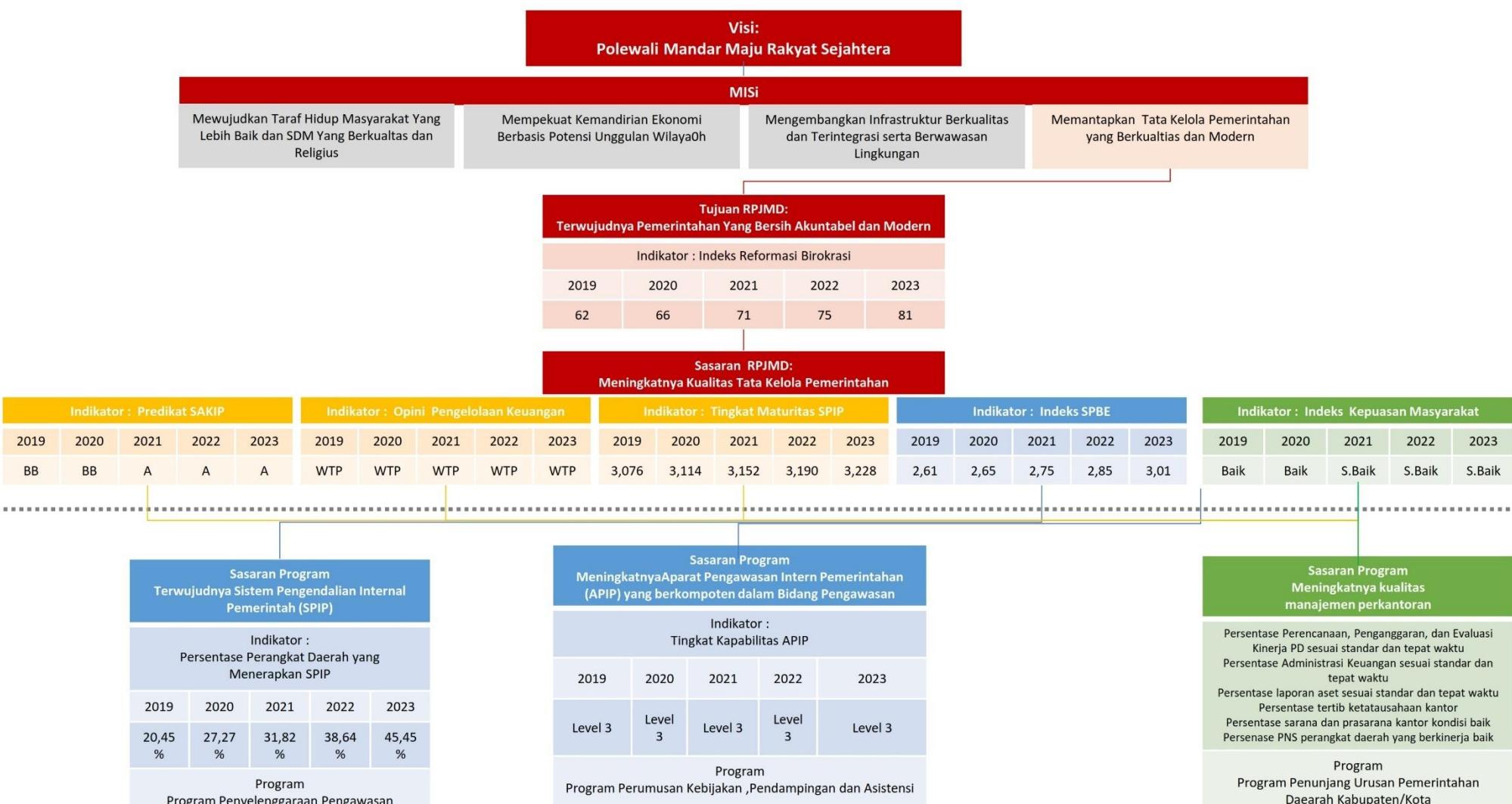
POHON KINERJA 2024

INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR





POHON KINERJA INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR





Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)				
Indikator : Percentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
20,45 %	27,27 %	31,82 %	38,64 %	45,45 %
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan				

Sasaran Program Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang erkompeten dalam bidang pengawasan				
Indikator : Tingkat Kapabilitas APIP				
2019	2020	2021	2022	2023
Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				

Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran				
Indikator 1: Percentase Perencanaan, penganggaran dan pelaporan PD sesuai standar dan tepat waktu				
2019	2020	2021	2022	2023
82	86	92	96	100
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja				
Indikator : Percentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD sesuai standar dan tepat waktu				
2019	2020	2021	2022	2023
100	100	100	100	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah					Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah					Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala					Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah					Unit Es. IV				
Indikator : Jumlah Perubahan Renstra yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu					Indikator : Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu					Indikator : Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu					Indikator : Jumlah Rekomendasi Hasil Monev dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu					Indikator : Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standart dan Tepat Waktu		Indikator : Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu		
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									



Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)				
Indikator : Percentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
20,45 %	27,27 %	31,82 %	38,64 %	45,45 %
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan				

Sasaran Program Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan				
Indikator : Percentase data sektoral yang valid				
2019	2020	2021	2022	2023
Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Program Program Perumsan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi				

Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran				
Indikator 2 : Percentase tertib keuangan perangkat daerah				
2019	2020	2021	2022	2023
88,89	91,11	93,33	95,56	97,78
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas Administrasi keuangan perangkat daerah				
Indikator : Percentase Administrasi Keuangan sesuai standar dan tepat waktu				
2019	2020	2021	2022	2023
100	100	100	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya gaji , Tunjangan dan Tambahkan Penghasilan ASN				
Indikator : Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan TPP				
2019	2020	2021	2022	2023
26	28	31	28	30
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya kualitas Laporan keuangan akhir tahun				
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu				
2019	2020	2021	2022	2023
3	3	3	3	3
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				

Unit
Es. IV



Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
Indikator : Percentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
20,45 %	27,27 %	31,82 %	38,64 %	45,45 %
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan				

Sasaran Program Meningkatnya Aprata Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompoten dalam Bidang Pengawasan				
Indikator : Tingkat Kapabilitas APIP				
2019	2020	2021	2022	2023
Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Program Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi				

Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran				
Indikator 3 : Percentase laporan asset sesuai standar dan tepat waktu				
2019	2020	2021	2022	2023
88,89	91,11	93,33	95,56	97,78
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				
Indikator : Percentase Tertib Administiasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				
2019	2020	2021	2022	2023
3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah				

Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya tertib penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
Indikator : Jumlah barang milik daerah tersusun Sesuai standar dan Tepat Waktu				
2019	2020	2021	2022	2023
7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah				

Unit
Es. III

Unit
Es. IV



Sasaran Program Terwujugnya Sistem pengendalian Intern (SPIP)				
Indikator : Persentase Perangkat DAERAH yang Menerapkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
20,45 %	27,27 %	31,82 %	36,64 %	45,45 %
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan				

Sasaran Program Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang Pengawasan				
Indikator : Tingkat Kapabilitas APIP				
2019	2020	2021	2022	2023
35	50	64	77	87
Program Program Perumusan Kebijakan, dan Asistensi				

Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran				
Indikator 4 : Persenase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik				
2019	2020	2021	2022	2023
78	79	80	85	85
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Indikator : Persentase Tertib Administiasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2019	2020	2021	2022	2023
95	98	100	100	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai				
Indikator : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
2019	2020	2021	2022	2023
0	0	2	2	0
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				

Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah				
Indikator : Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan				
2019	2020	2021	2022	2023
20	48	40	40	20
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				

Unit
Es. IV



Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP				
2019 2020 2021 2022 2023				
20,45 %	27,27 %	31,82 %	36,64 %	45,45 %
Program Prgram Penyelenggaraan Pengawasan				

Sasaran Program Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Kompeten dalam bidang Pengawasan				
Indikator : Tingkat Kapabilitas APIP				
2019 2020 2021 2022 2023				
Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Program Program Perumusan Kebijakan,Asistensi dan Pendampingan				

Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran				
Indikator 5 : Persentase tertib ketatausahaan kantor				
2019 2020 2021 2022 2023				
100	100	100	100	100
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor				
Indikator : Persentase Tertib Administiasi Umum Kantor				
2019 2020 2021 2022 2023				
95	100	100	100	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan					Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga					Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan makan minum					Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan					Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah					
Indikator : Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia					Indikator : Jumlah Jenis Alat-Alat Rumah Tangga yang Tersedia					Indikator : Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia					Indikator : Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia					Indikator : Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan					
20 19	20	20	21	22	20 23	20	20	20	21	20 23	20 19	20	20	21	20 23	20 19	20	20	21	20 23	20 19	20	20	21	20 23
5	6	6	6	1 0	8	8	8	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan					

Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor					Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				
Indikator : Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia					Indikator : Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan				
20 19	20	20	21	22	20 23	20 19	20	20	21
21	21	17	20	2 1	13	15	15	49	2 8
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD				



Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
Indikator : Persentase Perangkat Daerah Yang Merepkkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
20,45 %	27,27 %	31,82 %	36,64 %	45,45 %
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan				

Sasaran Program Meningkatnya Aarat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten Dalam Bidang Pengawasan				
Indikator : Tingkat Kapabilitas APIP				
2019	2020	2021	2022	2023
Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Program Program Permusinan Kebijakan ,Asistensi dan Pendampingan				

Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran				
Indikator 6 : Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik				
2019	2020	2021	2022	2023
70	73	75	77	80
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor				
Indikator : Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur				
2019	2020	2021	2022	2023
100	100	100	100 %	100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya tertib persuratan				
Indikator : Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola				
2019	2020	2021	2022	2023
969	110 1	100 0	100 0	1002
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik				
Indikator : Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi				
2019	2020	2021	2022	2023
1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

Sasaran Sub Kegiatan Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor				
Indikator : Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih				
2019	2020	2021	2022	2023
160 0	160 0	160 0	160 0	1600
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

Unit
Es. IV



Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
Indikator : Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
20,45 %	27,27 %	31,82 %	36,64 %	45,45 %
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan				

Sasaran Program Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompoten dalam Bidang Pengawasan				
Indikator : Tingkat Kapabilitas Apip				
2019	2020	2021	2022	2023
Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Program Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asisten				

Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran				
Indikator 6 : Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik				
2019	2020	2021	2022	2023
70	73	75	77	80
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda				
Indikator : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM				
2019	2020	2021	2022	2023
38	45	51	58	64
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin kantor				
Indikator : Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia				
2019	2020	2021	2022	2023
0	8	3	7	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor				
Indikator : Jumlah mebeleur yang tersedia				
2019	2020	2021	2022	2023
0	0	8	40	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				

Sasaran Sub Kegiatan Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional				
Indikator : Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin				
2019	2020	2021	2022	2023
7	7	7	7	7
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				

Sasaran Sub Kegiatan Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor				
Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara				
2019	2020	2021	2022	2023
15	16	20	21	25
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

Sasaran Sub Kegiatan Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor				
Indikator : Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara				
2019	2020	2021	2022	2023
160	160	160	160	1600
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

Unit
Es. IV



Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
Indikator : Percentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP					
2019	2020	2021	2022	2023	
20,45 %	27,27 %	31,82 %	36,64 %	45,45 %	
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan					

Sasaran Program Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompoten dalam Bidang Pengawasan					
Indikator : Tingkat Kapabilitas Apip					
2019	2020	2021	2022	2023	
Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
Program Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asisten					

Sasaran Program Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran					
Indikator 6 : Percentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik					
2019	2020	2021	2022	2023	
70	73	75	77	80	
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator : Percentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP

2019	2020	2021	2022	2023
45 OPD /KE C				

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

2019	2020	2021	2022	2023
0	0	0	8	8

Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja

2019	2020	2021	2022	2023
17	17	24	38	38

Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan

2019	2020	2021	2022	2023
0	24	24	31	31

Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Desa/ Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa

2019	2020	2021	2022	2023
12	12	24	24	34

Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

2019	2020	2021	2022	2023
0	0	2	2	2

Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

Unit
Es. III

Unit
Es. II



Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
Indikator : Percentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
20,45 %	27,27 %	31,82 %	36,64 %	45,45 %
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
Indikator : Percentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitorin dan Evaluasi				
Indikator : Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat				
2019	2020	2021	2022	2023
4	4	4	4	4
Sub Kegiatan Monitorin dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP				

Unit
Es. IV

Sasaran Program Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
Indikator : Percentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP					
2019	2020	2021	2022	2023	
20,45 %	27,27 %	31,82 %	36,64 %	45,45 %	
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan					

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
Indikator : Pemenuhan Manajemen Resiko terhadap OPD dalam Penerapan SPIP					
2019	2020	2021	2022	2023	
45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	
Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					
Indikator : Jumlah Penyelesaian Kerugian Negara					
2019	2020	2021	2022	2023	
0	0	1	1	1	
Sub Kegiatan Penanganan Kerugian Negara					

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan					
2019	2020	2021	2022	2023	
0	0	21	71	71	
Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					



Sasaran Program
Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang Berkompotensi dalam
Bidang Pengawasan

Indikator :
Tingkat Kapabilitas Apip

2019	2020	2021	2022	2023
Level 3				

Program
Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan
dan Asisten

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Indikator :
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan
SPIP

2019	2020	2021	2022	2023
45 OPD /KEC	45 OPD /KEC	45 OPD /KEC	45 OPD /KEC	45 OPD/KEC

Kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitas Pengawasanl

Unit
Es. III

Sasaran Sub Kegiatan
Terselenggaranya Pedoman Pembinaan
Pengawasan

Indikator :
Jumlah Pedoman Pengawasan dan SOP

2019	2020	2021	2022	2023
0	0	5	5	5

Sub Kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis Di bidang
Pengawasa

Sasaran Sub Kegiatan
Terselenggaranya Pedoman Pembinaan dalam menjana kan program
Tahunan

Indikator :
Jumlah Pedoman Pengawasan Dan SOP

2019	2020	2021	2022	2023
17	17	24	38	38

Sub Kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas
Pengawasan

Unit
Es. IV



Sasaran Program Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompoten dalam Bidang Pengawasan				
Indikator : Tingkat Kapabilitas Apip				
2019	2020	2021	2022	2023
Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Program Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asisten				

Unit
Es. II

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
Indikator : Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP				
2019	2020	2021	2022	2023
45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C	45 OPD /KE C

Unit
Es. III

Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Sasaran Sub Kegiatan Terselenggaranya Tingkat Kapabilitas APIP				
Indikator : Jumlah Dokumen Asistensi Yang tersedia				
2019	2020	2021	2022	2023
0	0	1	1	1
Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintah Daerah				

Unit
Es. IV

Sasaran Sub Kegiatan Terselenggaranya hasil Reviu APIP Terhadapo Penilaian RB

Indikator : Jumlah Dokumen Asistensi yang tersedia				
2019	2020	2021	2022	2023
0	0	1	1	1
Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi				

Sasaran Sub Kegiatan Terselenggaranya pendampingan Aparat Penegak Hukum terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Indikator : Jumlah Koordinasi dan Monitorin				
2019	2020	2021	2022	2023
0		4	4	4
Sub Kegiatan Koordinasi Monitorin dan Evaluasi Serta verifikasi Pencegahan dan				

Sasaran Sub Kegiatan Terselenggaranya Pendampingan Laporan Fakta Integritas terhadap OPD

Indikator : Jumlah Dokumen Asistensi Verifikasi				
2019	2020	2021	2022	2023
0	0	5	5	5
Sub Kegiatan Pendampingan asistensi,Verifikasi Penegakkan Integritas				

Lampiran 3

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar 2024

CAPAIAN KINERJA 2024

**INSPEKTORAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**





**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

INSPEKTORAT

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						K	Rp.	K	Rp.				
PENGAWASAN	INSPEKTORAT		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	A;WTP; Sangat Baik	5,100,479,774	A;WTP; Sangat Baik	5,042,645,817	98.87			
	INSPEKTORAT		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persen	100%	9,380,260	100%	9,380,260	100,00	Kurangnya SDM (ASN) untuk mendukung pelaksanaan tugas terkait Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1. Optimalisasi SDM (ASN) yang ada 2. Mengusulkan formasi SDM yang dibutuhkan ke BKPP	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana/Renstra Perubahan Tahunan Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1 Dokumen	3,682,670	1 Dokumen	3,595,725	97.64			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA PD Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1 Dokumen	1,401,980	1 Dokumen	1,401,980	100,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA PD Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1 Laporan	2,357,500	1 Laporan	2,357,500	100,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Laporan	1 Laporan	1,938,110	1 Laporan	1,938,110	100,00			
	INSPEKTORAT		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persen	100%	4,262,057,018	100%	4,227,512,322	99.19		1. Optimalisasi SDM (ASN) yang ada 2. Mengusulkan formasi SDM yang dibutuhkan ke BKPP 3. Optimalisasi SDM (PTT) dalam pengelolaan administrasi keuangan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	57 Orang	4,260,545,928	57 Orang	4,226,001,232	99.19			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Laporan	0 Laporan	1,511,090	0 Laporan	1,511,090	100,00			
	INSPEKTORAT		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS Berkinerja Baik	Persen	100%	140,032,800	100%	139,654,170	99.73	Kurangnya SDM dalam mendukung tugas-tugas kepegawaian	1. Optimalisasi SDM (ASN) yang ada 2. Mengusulkan formasi SDM yang dibutuhkan ke BKPP 3. Optimalisasi SDM (PTT) dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	100%	57 Org	-	57 Org	-	0.00			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	56 Orang	4 Org	140,032,800	4 Org	139,654,170	99.73			
INSPEKTORAT			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	Persen	100%	304,136,230	100%	301,704,775	99.20			



URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						K	Rp.	K	Rp.				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Yang Tersedia	1 paket	1 paket	27,952,000	1 paket	27,952,000	100.00			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Bahan Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	19,803,190	3 Paket	19,803,190	100.00			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dok	3 Dok	4,440,000	3 Dok	4,440,000	100.00			
			Sub Kegiatan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang tersedia	17 Paket	17 Paket	24,199,840	17 Paket	24,109,840	99.63			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Laporan	54 Lap.	222,991,200	54 Lap.	220,649,745	98.95			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Laporan	9 Lap.		4,750,000	9 Lap.				
INSPEKTORAT		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Tertib Ketatausahaan Kantor	Per센	100%	5,156,000	100%	5,156,000					
		Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Meubeleur	4 unit	4 unit	5,156,000	4 unit	5,156,000					
		Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0 Unit	0	0 Unit	0					
INSPEKTORAT		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Tertib Ketatausahaan Kantor	Per센	100%	289,940,366		270,031,290	93.13				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500 Lap	11,685,000	500 Lap	11,430,000	97.82			
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12 lap	62,344,966	12 lap	60,291,390	96.71			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Kebersihan Kantor	Laporan	15 Lap	215,910,400	15 Lap	198,309,900	91.85			
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Per센	100%	89,777,100	100%	89,207,000	99.36			
					Unit	5 Unit	58,667,100	5 Unit	58,177,000	99.16			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7 Unit	13,400,000	7 Unit	13,320,000	99.40			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8 Unit	6,900,000	8 Unit	6,900,000	100.00			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	10,810,000	2 Unit	10,810,000	100.00			
INSPEKTORAT		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN.	Percentase Perangkat daerah yang Menerapkan SPIP	Per센	100%	1,522,006,020	89.29	1,497,061,950	98.36				
INSPEKTORAT		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat daerah yang menerapkan SPIP	LHP	25 OPD	1,242,752,610	25 OPD	1,218,413,540	98.04				
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	39 LHP	384,802,380	39 LHP	384,722,380	99.98				
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	0 LHP	0	4 LHP	0					
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	24 LHR	257,669,670	24 LHR	257,449,670					
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1 LHP	13,889,940	1 LHP	13,889,870					
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	24 LHP	329,677,030	24 LHP	324,082,030					
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Jumlah	4		Kesepakatan	4					



URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
						K	Rp.	K	Rp.					
			Monitorin dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RP dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	5 Dokumen	256,713,590	5 Dokumen	238,269,590					
INSPEKTORAT	INSPEKTORAT		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah PD yang dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100%	279,253,410	74.56	278,648,410	99.78				
			Sub Kegiatan Penanganan Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian negara/Daerah yang	Jenis	1 LHP	996,500	1 LHP	996,500	100.00				
			Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan Tujuan tertentu.	Jenis	27 Laporan	278,256,910	27 Laporan	277,651,910	99.78				
INSPEKTORAT	INSPEKTORAT		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah PD yang dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	50%	5,164,800	54.17	4,413,900	85.46				
	INSPEKTORAT		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Aparat pengawasan internal Pemerintah yang kompeten	Persen	100%	5,164,800	65 Fungsi	4,413,900	85.46				
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Dokumen	0	0	0	0	0				
			Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan penilaian Reformasi dan Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi,verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen	0	0	0	0	0				
			Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan koordinasi,monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Kegiatan	0	0	0	0	0				
			Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan,asistensi dan verifikasi penegakan integritas.	Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	5,164,800	4 Perangkat Daerah	4,413,900	85.46				
		JUMLAH					6,627,650,594		6,544,121,667	98.74				

Inspektor

H. Ahmad Saifuddin, SH.,MM., CGCAE

Pangkat. Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 200003 1 084

Lampiran 4

Evaluasi Internal Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar 2024

EVALUASI INTERNAL 2024

INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR



EVALUASI INTERNAL

INSPEKTORAT

TAHUN 2024

No.	RINCIAN BELANJA	TOTAL	REALISASI
I	Pagu	6,627,650,594	6,544,121,667
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,522,006,020	1,497,061,950
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,242,752,610	1,218,413,540
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	384,802,380	384,722,380
	- Pemeriksaan OPD (<i>Kinerja, Probity</i>)		
	Evaluasi LAKIP		
	Evaluasi Maturitas SPIP		
	Evaluasi Pelayanan Publik		
	Evaluasi Register Resiko/Manajemen Resiko		
	Evaluasi Penyerapan Anggaran		
	Pengawasan Pengadaan P3K		
	Pemeriksaan Dana BOS		
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
	Pemeriksaan Opname Kas		
	Pemeriksaan Opname Kas OPD 8 Tim		
	- Reviu Laporan Kinerja	257,669,670	257,449,670
	Reviu ASB dan SHS		
	Reviu LPPD		
	Reviu Dana DAK		
	Reviu PBJ		

No.	RINCIAN BELANJA	TOTAL	REALISASI
	Reviu Penilaian Mandiri RB		
	Reviu RKA OPD/KAB		
	Reviu RKPD/RKPD-P		
	Reviu Program JKM		
	Reviu Renja OPD		
	Reviu RKA OPD		
	Reviu KUA PPAS		
	Reviu Kinerja BMD		
	Reviu Kinerja Rotasi Mutasi Kepegawaian		
	Reviu Kinerja Perizinan		
	Reviu UKPBJ		
	Reviu HPS BersamaUKPBJ		
	- Reviu Laporan Keuangan	13,889,940	13,889,870
	Reviu Keuangan Kabupaten		
	Reviu Keuangan OPD		
	- Pengawasan desa	329,677,030	324,082,030
	Pemeriksaan Desa Kepatuhan Pajak 144 Desa (16 Tim)		
	Pemeriksaan Dana Desa/Pemeriksaan DD dan ADD		
	- Kerjasama Pengawasan Internal		
	Telaan sejawad		
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI,BPKP dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP,	256,713,590	238,269,590
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	279,253,410	278,648,410
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	996,500	996,500



No.	RINCIAN BELANJA	TOTAL	REALISASI
	Pemeriksaan PPKN (Pengaduan)		
	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	278,256,910	277,651,910
	Pemeriksaan Investigasi		
	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai		
	Pemeriksaan penanganan Pengaduan Masyarakat		
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5,164,800	4,413,900
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
	Konsulting		
	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi (OPD Sampling Kab)		
	Koordinasi, Monitorin dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
	Pengelolaan Data MCP/KPK		
	Gratifikasi		
	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi Penegakkan Integritas	5,164,800	4,413,900
	Saber Pungli		
	Survey penilaian Integritas		
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB	5,100,479,774	5,042,645,817
	Belanja Wajib Mengikat	4,597,468,394	4,542,779,522
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,260,545,928	4,226,001,232

No.	RINCIAN BELANJA	TOTAL	REALISASI
2	Belanja Listrik	62,344,966	60,291,390
3	Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan kendaraan dinas	58,667,100	58,177,000
4	Belanja Jasa Tenaga Non ASN	215,910,400	198,309,900
I	Perencanaan,Penggaran dan Evaluasi Kinerja PD	9,380,260	9,380,260
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,682,670	3,682,670
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,401,980	1,401,980
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,357,500	2,357,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,938,110	1,938,110
2	Admininstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,511,090	1,511,090
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1,511,090	1,511,090
3	Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140,032,800	139,654,170
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	140,032,800	139,654,170
4	Admininstrasi Umum Perangkat Daerah	304,136,230	301,704,775
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,952,000	27,952,000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,803,190	19,803,190
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	4,440,000	4,440,000
5	Penyediaan bahan material	24,199,840	24,109,840
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227,741,200	225,399,745
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5,156,000	5,156,000

No.	RINCIAN BELANJA	TOTAL	REALISASI
1	Pengadaan Mebel	5,156,000	5,156,000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,685,000	11,430,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,685,000	11,430,000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,110,000	31,030,000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13,400,000	13,320,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,900,000	6,900,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,810,000	10,810,000

Polewali, 24 Desember 2024

Inspektur,

H.Ahmad Saifuddin,SH,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 200003 1 048

Lampiran 5

Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Triwulan I-IV Tahun 2024

REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TRIWULAN I - IV TAHUN 2024





**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PIERODE PELAKSANAAN TRIWULAN I s.d IV TAHUN 2024**

No	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA-P Perangkat Daerah. Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)	Ket			
					I		II		III		IV							
			4	5	6	7	8	9	10	11	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp				
1	2	3	Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor	100	%	5.100.479.774	252	1.580.866.627	214	1.241.971.102	287	1.313.962.459	348	905.845.629	1.101	5.042.645.817	98,2	98,87	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	9.380.260	3	3.595.725	1	3.759.480	1	1.698.110	1	326.945	6	9.380.260	100,0	100,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	3.682.670	2	3.595.725	0	-	-	-	-	86.945	2	3.595.725	100,0	97,64	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1.401.980	1	-	0	1.401.980	-	-	-	-	1	1.401.980	100,0	100,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	2.357.500	0	-	1	2.357.500	-	-	-	-	1	2.357.500	100,0	100,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dok	1.938.110	0	-	0	-	1	1.698.110	1	240.000	2	1.938.110	100,0	100,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100	%	4.262.057.018	57	1.478.320.879	55	940.322.088	56	1.207.729.785	57	601.139.570	57	4.227.512.322	98,3	99,19	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	Org/bln	4.260.545.928	57	1.478.320.879	55	940.322.088	56	1.207.729.785	56	599.628.480	56	4.226.001.232	98,2	99,19	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1.511.090	0	-	0	-	-	-	1	1.511.090	1	1.511.090	100,0	100,00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Kepegawaian yang lengkap	100	%	140.032.800	6	-	4	111.308.536	-	-	-	28.345.634	10	139.654.170	17,9	99,73	
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56	Org	140.032.800	6	-	4	111.308.536	0	-	0	28.345.634	10	139.654.170	17,9	99,73	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tersedia	100	Per센	304.136.230	79	48.294.356	39	91.796.784	16	48.273.864	173	113.339.771	307	301.704.775	171,5	99,20	
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	27.952.000	1	6.985.000	1	3.167.000	1	8.550.000		9.250.000	1	27.952.000	100,0	100,00	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	19.803.190	1	6.471.300	1	680.000	1	11.716.540		935.350	3	19.803.190	100,0	100,00	
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	Dok	4.440.000	1	740.000	0	-	1	1.480.000	1	2.220.000	3	4.440.000	100,0	100,00	

1.4.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17	Paket	24.199.840	3	5.549.556	7	10.330.000	0	-	7	8.230.284	17	24.109.840	100,0	99,63		
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155	Lap	227.741.200	73	28.548.500	30	77.619.784	13	26.527.324	165	92.704.137	281	225.399.745	181,3	98,97		
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pengadaan Baru Milik Perangkat Daerah	100	%	5.156.000	0		-	-	-	-	4	5.156.000	4	5.156.000	100,0	100,0		
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	5.156.000	0		-	0	-	0	-	4	5.156.000	4	5.156.000	100,0	100,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	0		-	0	-		-	0	-	0	0,0	0,00		
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Tagihan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	289.940.366	107	50.655.667	107	72.309.464	207	44.581.550	106	102.484.609	527	270.031.290	100,0	93,13		
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Lap	11.685.000	100		-	100	900.000	200	370.000	100	10.160.000	500	11.430.000	100,0	97,82	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	62.344.966	3	14.655.667	3	16.669.464	3	9.011.550	3	19.954.709	12	60.291.390	100,0	96,71		
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Lap	215.910.400	4	36.000.000	4	54.740.000	4	35.200.000	3	72.369.900	15	198.309.900	100,0	91,85		
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	89.777.100	0		-	8	22.474.750	7	11.679.150	7	55.053.100	22	89.207.000	100,0	99,36	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	58.667.100	0		-	2	16.794.750	1	4.199.150	2	37.183.100	5	58.177.000	100,0	99,16	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	13.400.000	0		-	2	2.840.000	3	6.100.000	2	4.380.000	7	13.320.000	100,0	99,40	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	6.900.000	0		-	4	2.840.000	3	1.380.000	1	2.680.000	8	6.900.000	100,0	100,00	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	10.810.000	0		-	0	-		-	2	10.810.000	2	10.810.000	100,0	100,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Percentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	53,45	%	1.522.006.020	35	226.934.510	27	211.221.220	56	446.267.380	24	612.638.840	142	1.497.061.950	125,0	98,36		
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Percentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	45,45	%	1.242.752.610	28	210.614.510	9	130.195.790	42	384.407.380	24	493.195.860	103	1.218.413.540	110,8	98,04		
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	39	Lap	384.802.380	10	96.400.600	5	31.887.000	14	136.737.380	10	119.697.400	39	384.722.380	100,0	99,98		
2.1.2	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	24	Lap	257.669.670	8	3.299.040	1	6.400.000	15	127.600.000	4	120.150.630	28	257.449.670	116,7	99,91		
2.1.3	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Lap	13.889.940	0	5.089.870	0	-	1	8.800.000	0	-	1	13.889.870	100,0	100,00		
2.1.4	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24	Lap	329.677.030	10	105.825.000	1	22.307.600	10	59.520.000	9	136.429.430	30	324.082.030	125,0	98,30		
2.1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Dok	256.713.590	0	-	2	69.601.190	2	51.750.000	1	116.918.400	5	238.269.590	100,0	92,82		
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan PD yang dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	30	Lap	279.253.410	7	16.320.000	18	81.025.430	14	61.860.000		119.442.980	39	278.648.410	139,3	99,78		
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Lap	996.500	0	-	1	996.500		-	0	-	1	996.500	100,0	100,00		
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	27	Lap	278.256.910	7	16.320.000	17	80.028.930	14	61.860.000	11	119.442.980	49	277.651.910	181,5	99,78		



3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	100	%	5.164.800	-	-	-	-	-	-	-	4.413.900	0	4.413.900	0,0	85,46	
3.1	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Asistensi, Monitorin dan Evaluasi yang tersedia	5	Dok	5.164.800	-	-	-	-	-	-	-	4.413.900	0	4.413.900	0,0	85,46	
3.1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	PD	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0,0	0,00		
3.1.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	Keg	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0,0	0,00		
3.1.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4	PD	5.164.800	0	-	-	-	-	-	-	4.413.900	0	4.413.900	0,0	85,46	
JUMLAH			994		6.627.650.594	287	1.807.801.137	241	1.453.192.322	343	1.760.229.839	348	-	1.073	6.544.121.667			
Rata-rata Persen Capaian (%)																107,95	98,74	
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Catatan Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024	
Faktor pendorong (asumsi) keberhasilan kinerja :	Faktor penghambat (risiko) pencapaian kinerja:
Adanya Komitmen dari Seluruh Unsur Perangkat Daerah Inspektorat Kab. Polewali Mandar dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara optimal khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah lingkup Kab. Polewali Mandar sehingga terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> * Besaran Anggaran Pengawasan yang belum berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024; * Keterbatasan Anggaran KAS Daerah yang menghambat proses pencairan anggaran kegiatan PD

Disusun

Tanggal : 02 Januari 2025



Lampiran 6

Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Triwulan I-IV Tahun 2024

REALISASI KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TRIWULAN I - IV TAHUN 2024





**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PIERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I s.d IV TAHUN 2024**

No	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA-P Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)	Ket				
				I		II		III		IV								
				Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)	10 = 9/4x100	11								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor	100 % 5.100.479.774	252 1.580.866.627	214 1.241.971.102	287 1.313.962.459	348 905.845.629	1.101 5.042.645.817	98,2	98,87								
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok 9.380.260	3 3.595.725	1 3.759.480	1 1.698.110	1 326.945	6 9.380.260	100,0	100,00								
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok 3.682.670	2 3.595.725	0 -	- -	-	86.945 2 3.595.725	100,0	97,64								
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok 1.401.980	1 -	0 1.401.980	- -	-	1 1.401.980	100,0	100,00								
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok 2.357.500	0 -	1 2.357.500	- -	-	1 2.357.500	100,0	100,00								
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok 1.938.110	0 -	0 -	1 1.698.110	1 240.000	2 1.938.110	100,0	100,00								
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100 % 4.262.057.018	57 1.478.320.879	55 940.322.088	56 1.207.729.785	57 601.139.570	57 4.227.512.322	98,3	99,19								
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Org/bln 4.260.545.928	57 1.478.320.879	55 940.322.088	56 1.207.729.785	56 599.628.480	56 4.226.001.232	98,2	99,19								
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap 1.511.090	0 -	0 -	- -	- 1	1.511.090 1 1.511.090	100,0	100,00								
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Kepegawaian yang lengkap	100 % 140.032.800	6 -	4 111.308.536	- -	- -	28.345.634 10 139.654.170	17,9	99,73								
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Org 140.032.800	6 -	4 111.308.536	0 -	0 -	28.345.634 10 139.654.170	17,9	99,73								
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Umum yang tersedia	100 Persen 304.136.230	79 48.294.356	39 91.796.784	16 48.273.864	173 113.339.771	307 301.704.775	171,5	99,20								
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 27.952.000	1 6.985.000	1 3.167.000	1 8.550.000	-	9.250.000 1 27.952.000	100,0	100,00								
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket 19.803.190	1 6.471.300	1 680.000	1 11.716.540	-	935.350 3 19.803.190	100,0	100,00								
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok 4.440.000	1 740.000	0 -	1 1.480.000	1 2.220.000	3 4.440.000	100,0	100,00								

1.4.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17	Paket	24.199.840	3	5.549.556	7	10.330.000	0	-	7	8.230.284	17	24.109.840	100,0	99,63		
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155	Lap	227.741.200	73	28.548.500	30	77.619.784	13	26.527.324	165	92.704.137	281	225.399.745	181,3	98,97		
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Baru Milik Perangkat Daerah	100	%	5.156.000	0							5.156.000	4	5.156.000	100,0	100,00		
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	5.156.000	0		-	0	-	0	-	4	5.156.000	4	5.156.000	100,0	100,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	0		-	0	-		-	0	-	0	0,0	0,00		
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tagihan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	289.940.366	107	50.655.667	107	72.309.464	207	44.581.550	106	102.484.609	527	270.031.290	100,0	93,13		
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Lap	11.685.000	100		-	100	900.000	200	370.000	100	10.160.000	500	11.430.000	100,0	97,82	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	62.344.966	3	14.655.667	3	16.669.464	3	9.011.550	3	19.954.709	12	60.291.390	100,0	96,71		
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Lap	215.910.400	4	36.000.000	4	54.740.000	4	35.200.000	3	72.369.900	15	198.309.900	100,0	91,85		
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	89.777.100	0		-	8	22.474.750	7	11.679.150	7	55.053.100	22	89.207.000	100,0	99,36	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	58.667.100	0		-	2	16.794.750	1	4.199.150	2	37.183.100	5	58.177.000	100,0	99,16	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	13.400.000	0		-	2	2.840.000	3	6.100.000	2	4.380.000	7	13.320.000	100,0	99,40	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	6.900.000	0		-	4	2.840.000	3	1.380.000	1	2.680.000	8	6.900.000	100,0	100,00	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	10.810.000	0		-	0	-		-	2	10.810.000	2	10.810.000	100,0	100,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	53,45	%	1.522.006.020	35	226.934.510	27	211.221.220	56	446.267.380	24	612.638.840	142	1.497.061.950	125,0	98,36		
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	45,45	%	1.242.752.610	28	210.614.510	9	130.195.790	42	384.407.380	24	493.195.860	103	1.218.413.540	110,8	98,04		
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	39	Lap	384.802.380	10	96.400.600	5	31.887.000	14	136.737.380	10	119.697.400	39	384.722.380	100,0	99,98		
2.1.2	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	24	Lap	257.669.670	8	3.299.040	1	6.400.000	15	127.600.000	4	120.150.630	28	257.449.670	116,7	99,91		
2.1.3	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Lap	13.889.940	0	5.089.870	0	-	1	8.800.000	0	-	1	13.889.870	100,0	100,00		
2.1.4	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24	Lap	329.677.030	10	105.825.000	1	22.307.600	10	59.520.000	9	136.429.430	30	324.082.030	125,0	98,30		
2.1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Dok	256.713.590	0		-	2	69.601.190	2	51.750.000	1	116.918.400	5	238.269.590	100,0	92,82	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan PD yang dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	30	Lap	279.253.410	7	16.320.000	18	81.025.430	14	61.860.000		119.442.980	39	278.648.410	139,3	99,78		
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Lap	996.500	0		-	1	996.500		-	0	-	1	996.500	100,0	100,00	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	27	Lap	278.256.910	7	16.320.000	17	80.028.930	14	61.860.000	11	119.442.980	49	277.651.910	181,5	99,78		



3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	100	%	5.164.800	-	-	-	-	-	-	-	4.413.900	0	4.413.900	0,0	85,46	
3.1	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Asistensi, Monitorin dan Evaluasi yang tersedia	5	Dok	5.164.800	-	-	-	-	-	-	-	4.413.900	0	4.413.900	0,0	85,46	
3.1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	PD	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0,0	0,00		
3.1.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	Keg	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0,0	0,00		
3.1.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4	PD	5.164.800	0	-	-	-	-	-	-	4.413.900	0	4.413.900	0,0	85,46	
JUMLAH			994		6.627.650.594	287	1.807.801.137	241	1.453.192.322	343	1.760.229.839	348		-	1.073	6.544.121.667		
															Rata-rata Persen Capaian (%)	107,95	98,74	
															Predikat Kinerja	Sangggat Tinggi	Sangggat Tinggi	

Catatan Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024		
Faktor pendorong (asumsi) keberhasilan kinerja :	Faktor penghambat (resiko) pencapaian kinerja:	
Adanya Komitmen dari Seluruh Unsur Perangkat Daerah Inspektorat Kab. Polewali Mandar dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara optimal khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah lingkup Kab. Polewali Mandar sehingga terselesaigannya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> * Besaran Anggaran Pengawasan yang belum berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024; * Keterbatasan Anggaran KAS Daerah yang menghambat proses pencairan anggaran kegiatan PD 	

Disusun
Tanggal : 02 Januari 2025



Lampiran 7

Cascading SAKIP Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

CASCADING SAKIP

INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR



MATRIKS CASCADING KINERJA
INSPEKTORAT

Lampiran 8

Cascading SAKIP Administrasi Umum

CASCADING SAKIP KOMPONEN ADMINISTRASI UMUM



TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (Kondisi Akhir)	2024	
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan										
VISI : POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA																										
MISI 4 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN																										
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akurabel dan modern	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah											Angka	58.02	62.18	63.09	71.00	75.00	81.00	81.00	85
																		Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
																		Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
																		Predikat	B	BB	BB	BB	BB	A	A	A
																		persen	86.67%	93.33%	95.56%	93.33%	95.56%	97.78%	97.78%	100.00%
																		Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
																		persen	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
																		persen	78.00%	92.00%	96.00%	96.00%	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%
																		persen	93.33%	95.56%	95.56%	95.56%	97.78%	97.78%	100.00%	100.00%
																		persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
																		persen	93.33%	93.33%	95.56%	95.56%	97.78%	97.78%	44.65%	100.00%
																		persen	75.00%	75.00%	80.00%	85.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%
																		persen	75.00%	77.00%	77.00%	77.00%	80.00%	80.00%	83.00%	83.00%
																		persen	75.00%	80.00%	85.00%	85.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%
																		persen								
																		Jumlah Perubahan Renstra yang Tersusun Sesuai standar dan tepat waktu								
																		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
																		dokumen								
																		Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu								
																		Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
																		dokumen								
																		Jumlah Rekomendasi Perbaikan dan Penyesuaian yang Tersusun Sesuai Standart dan Tepat Waktu								
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
																		dokumen								
																		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standart dan Tepat Waktu								
																		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
																		dokumen								
																		Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu								
																		dokumen								



TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (Kondisi Akhir)	2024	
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan										
								Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
											Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN											
											Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan ketarigan perangkat daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	Jumlah SPM yang diterbitkan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen											
											Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen											
											Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala	Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	dokumen											
								Meningkatnya tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah																
											Meningkatnya tertib penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	dokumen											
								Meningkatnya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
											Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai	Jumlah Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket											
											Meningkatnya Disiplin Tari dan Kerja Pegawai	Jumlah Laporan Ketidakhadiran dan Kerja berbasis elektronik	Jumlah Laporan Ketidakhadiran dan Kerja berbasis elektronik	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	dokumen											
											Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan	Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungi	Pegawai											
											Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan	Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungi	Pegawai											
								Meningkatnya tertib Administrasi Umum Kantor	Persentase tertib Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
											Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis											
											Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis											
											Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga	Jumlah Jenis Alat-Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Jumlah Jenis Alat-Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis											
											Terpenuhinya kebutuhan makan minum	Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia	Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis											
											Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis											
											Terpenuhinya kebutuhan bahan bacan koran dan majalah	Jumlah Jenis Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis											
											Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen											
								Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBM	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah																
											Terpenuhinya kebutuhan mebeluer kantor	Jumlah Unit mebeluer	Jumlah Unit mebeluer	Pengadaan Mebel	paket											
											Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin dst	Jumlah Jenis Alat Kantor	Jumlah Jenis Alat Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	paket											
								Meningkatnya tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah																
											Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat											



TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (Kondisi Akhir)	2024				
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran Program	Indikator	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan													
														Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	paket												
														Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor	Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	m2												
																	Persen												
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit											
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit											
																	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit									
																	Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	m2										

Lampiran 9

Rencana Aksi Inspektorat 2024

RENCANA AKSI 2024

INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR



RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Penetapan tujuan dan lingkup pengawasan Kinerja	Arahan pimpinan												
	b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kinerja	Surat Tugas												
	c. Mengalokasikan Sumberdaya	Notulen / Hasil Rapat												
II	PELAKSANAAN													
	a. Pengumpulan dan pengujian bukti	Objek Pemeriksaan												
	b. Evaluasi bukti dan pengambilan keputusan	Objek Pemeriksaan												
	c. Pengambilan kesimpulan	Objek Pemeriksaan												
	d. Pengembangan temuan dan rekomendasi	Objek Pemeriksaan												
	e. Mendokumentasikan Kegiatan	File Dokumentasi kegiatan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Penyampaian simpulan sementara LHP	Dokumen LHP												
	b. Penyusunan laporan LHP	Dokumen LHP												
	c. Distribusi laporan LHP	Dokumen LHP												
	d. Monitoring tindak lanjut LHP	Dokumen Laporan LHP												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Sekretaris

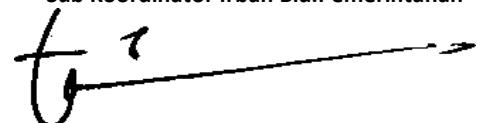


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Sub Koordinator Irban Bid.Pemerintahan



H.TAUFIK A PALONTJONGGI,S.IP,M.Adm KP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19690609 199112 1 001

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Penetapan tujuan dan lingkup pengawasan Kinerja	Arahan pimpinan												
	b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kinerja	Surat Tugas												
	c. Mengalokasikan Sumberdaya	Notulen / Hasil Rapat												
II	PELAKSANAAN													
	a. Pengumpulan dan pengujian bukti	Objek Pemeriksaan												
	b. Evaluasi bukti dan pengambilan keputusan	Objek Pemeriksaan												
	c. Pengambilan kesimpulan	Objek Pemeriksaan												
	d. Pengembangan temuan dan rekomendasi	Objek Pemeriksaan												
	e. Mendokumentasikan Kegiatan	File Dokumentasi kegiatan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Penyampaian simpulan sementara LHP	Dokumen LHP												
	b. Penyusunan laporan LHP	Dokumen LHP												
	c. Distribusi laporan LHP	Dokumen LHP												
	d. Monitoring tindak lanjut LHP	Dokumen Laporan LHP												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

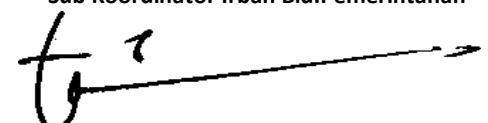


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Sub Koordinator Irban Bid.Pemerintahan



H.TAUFIK A PALONTJONGI,S.IP,M.Adm KP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19690609 199112 1 001

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

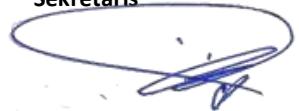
SUB KEGIATAN : REVIU LAPORAN KINERJA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Penetapan tujuan dan lingkup pengawasan Kinerja	Arahan pimpinan												
	b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kinerja	Surat Tugas												
	c. Mengalokasikan Sumberdaya	Notulen / Hasil Rapat												
II	PELAKSANAAN													
	a. Pengumpulan dan pengujian bukti	Objek Pemeriksaan												
	b. Evaluasi bukti dan pengambilan keputusan	Objek Pemeriksaan												
	c. Pengambilan kesimpulan	Objek Pemeriksaan												
	d. Pengembangan temuan dan rekomendasi	Objek Pemeriksaan												
	e. Mendokumentasikan Kegiatan	File Dokumentasi kegiatan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Penyampaian simpulan sementara LHP	Dokumen LHP												
	b. Penyusunan laporan LHP	Dokumen LHP												
	c. Distribusi laporan LHP	Dokumen LHP												
	d. Monitoring tindak lanjut LHP	Dokumen Laporan LHP												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Sub Koordinator

Irban Bid.Ekonomi dan Pembangunan



AGUNG ARIEF,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19700809 199101 1 001

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT

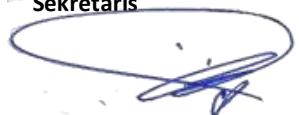
SUB KEGIATAN : REVIU LAPORAN KEUANGAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Penetapan tujuan dan lingkup pengawasan Kinerja	Arahan pimpinan												
	b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kinerja	Surat Tugas												
	c. Mengalokasikan Sumberdaya	Notulen / Hasil Rapat												
II	PELAKSANAAN													
	a. Pengumpulan dan pengujian bukti	Objek Pemeriksaan												
	b. Evaluasi bukti dan pengambilan keputusan	Objek Pemeriksaan												
	c. Pengambilan kesimpulan	Objek Pemeriksaan												
	d. Pengembangan temuan dan rekomendasi	Objek Pemeriksaan												
	e. Mendokumentasikan Kegiatan	File Dokumentasi kegiatan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Penyampaian simpulan sementara LHP	Dokumen LHP												
	b. Penyusunan laporan LHP	Dokumen LHP												
	c. Distribusi laporan LHP	Dokumen LHP												
	d. Monitoring tindak lanjut LHP	Dokumen Laporan LHP												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Sub Koordinator Irban Bid.Kesejahteraan Rakyat



ARSAL,ST,MT

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19750725 200312 1 007

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : PENGAWASAN DESA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Penetapan tujuan dan lingkup pengawasan Kinerja	Arahan pimpinan												
	b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kinerja	Surat Tugas												
	c. Mengalokasikan Sumberdaya	Notulen / Hasil Rapat												
II	PELAKSANAAN													
	a. Pengumpulan dan pengujian bukti	Objek Pemeriksaan												
	b. Evaluasi bukti dan pengambilan keputusan	Objek Pemeriksaan												
	c. Pengambilan kesimpulan	Objek Pemeriksaan												
	d. Pengembangan temuan dan rekomendasi	Objek Pemeriksaan												
	e. Mendokumentasikan Kegiatan	File Dokumentasi kegiatan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Penyampaian simpulan sementara LHP	Dokumen LHP												
	b. Penyusunan laporan LHP	Dokumen LHP												
	c. Distribusi laporan LHP	Dokumen LHP												
	d. Monitoring tindak lanjut LHP	Dokumen Laporan LHP												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Sekretaris

H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Sub Koordinator Irban Bid.Pemerintahan

H.TAUFIK A PALONTJONGI,S.IP,M.Adm KP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19690609 199112 1 001

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Penetapan tujuan dan lingkup pengawasan Kinerja	Arahan pimpinan												
	b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kinerja	Surat Tugas												
	c. Mengalokasikan Sumberdaya	Notulen / Hasil Rapat												
II	PELAKSANAAN													
	a. Pengumpulan dan pengujian bukti	Objek Pemeriksaan												
	b. Evaluasi bukti dan pengambilan keputusan	Objek Pemeriksaan												
	c. Pengambilan kesimpulan	Objek Pemeriksaan												
	d. Pengembangan temuan dan rekomendasi	Objek Pemeriksaan												
	e. Mendokumentasikan Kegiatan	File Dokumentasi kegiatan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Penyampaian simpulan sementara LHP	Dokumen LHP												
	b. Penyusunan laporan LHP	Dokumen LHP												
	c. Distribusi laporan LHP	Dokumen LHP												
	d. Monitoring tindak lanjut LHP	Dokumen Laporan LHP												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Sub Koordinator Irban Investigasi



ERWIN,S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19700616 199103 1 002

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Pembuatan SPK	SK PTT												
	b. Pembuatan Surat keluar	1550 Surat												
	c. Pembuatan Surat masuk	Surat Tugas												
II	PELAKSANAAN													
	a. Upah jasa tenaga operator dan tenaga administrasi	Jasa pekerja												
	b. Perejalanan dinas mengantar surat	Surat terdistribusi												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Arsip SPK	13 Dokumen												
	b. Arsip surat keluar	959 Surat												
	c. Arsip Surat Masuk	1200 Surat												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Sekretaris

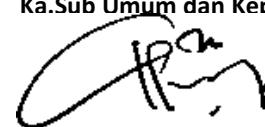


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

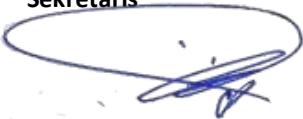
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat daftar kebutuhan kantor	Dokumen												
	b. Pembuat SPK	SK PTT												
II	PELAKSANAAN													
	a. Belanja kebutuhan pelayanan kantor	3 Jenis/Bulan												
	b. Upah jasa kebersihan dan keamanan kantor	2 Orang/perbulan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Kebersihan dan keamanan kantor terjaga	Indah dan aman												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kenegawaian



IRNA DJASLIANAH,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

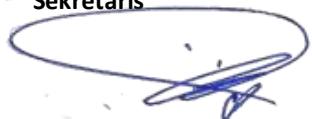
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Mengecek Jumlah Komponen Intalasi Listrik	5 Jenis												
II	PELAKSANAAN													
	a. Mengecek Jumlah Instalasi listrik yang rusak/diperbaiki	5 Jenis												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Komponen instalasi yang sudah di perbaiki	5 Jenis												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

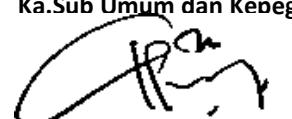


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepgawainan



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

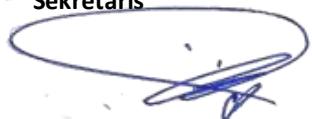
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Mengecek Jumlah Tagihan Listrik dan Air	Daftar Tagihan												
II	PELAKSANAAN													
	a. Mengecek Jumlah Tagihan Listrik dan Air	3 Jenis/Bulan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Telah Melunasi Tagihan Listrik dan Air	3 Dokumen Kwitasi												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepgawainan



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Surat Rapat	Surat												
	b. Menyiapkan Makanan Minuman Rapat	Bahan												
	c. Membuat Daftar kebutuhan Makan Minum Tamu	Daftar												
II	PELAKSANAAN													
	a. Rapat Evaluasi Bulanan	5 Jenis												
	b. Makan dan Minum Rapat dan Tamu	Bahan												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Notulen hasil rapat	5 Jenis												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

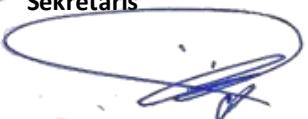
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGADAAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Mengantar ketempat percetakan untuk difotocopi dan di gandakan	Dokumen												
II	PELAKSANAAN													
	a. Fotocopy dan Penggadaan	5 Jenis												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Fotocopy dan Penggadaan	5 Jenis												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

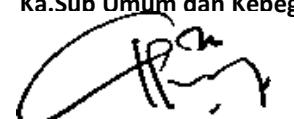


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

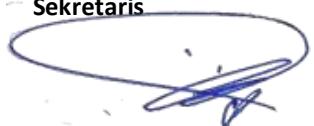
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat kontrak Kerja Sama	Dokumen												
	b. Mengecek Besaran Jumlah tagihan surat kabar	Dokumen												
II	PELAKSANAAN													
	a. Membayar jumlah tagihan surat kabar	3 Jenis												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Surat Kabar	3 Jenis												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepgawainan



IRNA DJASLIANAH,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

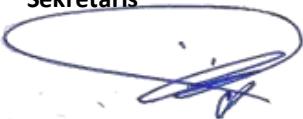
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN /MATERIAL

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Daftar Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Dokumen												
II	PELAKSANAAN													
	a. Belanja Kebutuhan Alat Tulis Kantor	17 Jenis												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Surat Kabar	3 Jenis												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

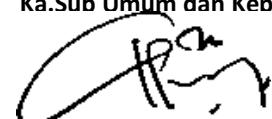


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

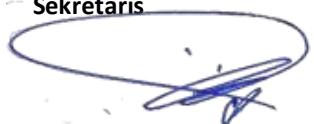
SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Perintah Pimpinan yang menjadi dasar Perjalanan	Surat												
	b. Menerima surat masuk yang menjadi dasar perjalanan	Surat												
	c. Membuat Surat tugas dan SPPD	Surat Tugas												
II	PELAKSANAAN													
	a. Surat Tugas dan SPPD	Surat Tugas												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Persentase Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	54 Laporan												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

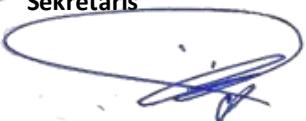
SUB KEGIATAN : PENGADAAN MEBEL

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Daftar kebutuhan belanja	Daftar												
II	PELAKSANAAN													
	a. Daftar Terima	2 Jenis												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Telah meluniasi pembelian Mebel	2 Jenis												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

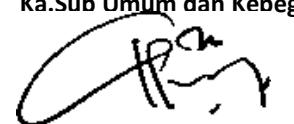


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

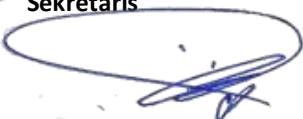
SUB KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Kontrak Kerja sama	Dokumen												
	b. Mengecek Kondisi kendaraan yang akan di ganti	Sperpace												
II	PELAKSANAAN													
	a. Mengganti kendaraan Sparpace yang rusak	5 unit												
	b. Membayar Sparpace yang telah di ganti	5 unit												
	c. Mengisi BBM kendaraan operasional	5 unit												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Kendaraan dinas yang siap di pakai	5 unit												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

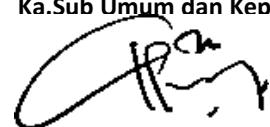


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

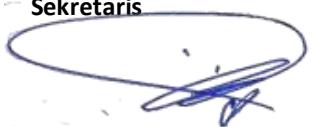
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Konsultasi ke kantor samsat	Dokumen												
	b. Fotocopy surat izin kendaraan	STNK						#						#
II	PELAKSANAAN													
	a. Membayar pajak kendaraan dinas roda 2	STNK						#						#
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN							#						#
	a. Perpanjangan pajak kendaraan Dinas	STNK						#						#

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

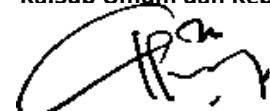


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepgawainan



IRNA DJASLIANAH,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

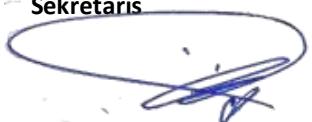
RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat kontrak kerjasama	Dokumen												
	b. Mengecek kondisi kondisi kendaraan yang akan di ganti	Sperpace												
II	PELAKSANAAN													
	a. Mengganti kendaraan Sparpace yang rusak	5 unit												
	b. Membayar Sparpace yang telah di ganti	5 unit												
	c. Mengisi BBM kendaraan operasional	5 unit												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Kendaraan dinas yang siap di pakai	5 unit												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kenegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

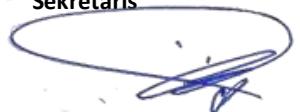
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Mengecek kondisi kondisi Peralatan yang akan di ganti	8 Unit												
II	PELAKSANAAN													
	Mengganti /Servis Sperpace peralatan dan a. perlengkapan kantor yang rusak	8 Unit												
	b. Membayar Biaya Servis	8 Unit												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Peralatan Siap Pakai	8 Unit												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

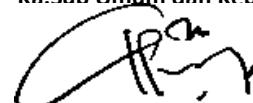


H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kenegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

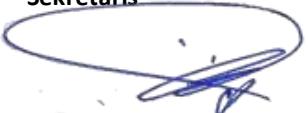
SUB KEGIATAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat daftar belanja kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	57 Pasang												
II	PELAKSANAAN													
	a. Daftar Terima	57 Pasang												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Telah melunasi daftar pakaian dinas beserta perlengkapannya	57 Pasang												
	b. Pelaporan	57 Pasang												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepgawainan



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

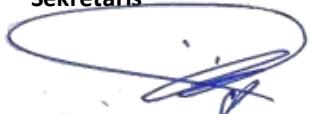
SUB KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSINYA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat daftar Diklat yang akan di ikuti	57 Orang												
II	PELAKSANAAN													
	a. Menunggu Jadwal Pelaksanaan Diklat	57 Orang												
	b. Diklat yang akan di ikuti	57 Orang												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Telah Melaksanakan Diklat	57 Orang												
	b. Pelaporan	57 Orang												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Umum dan Kepegawaian



IRNA DJASLIANAN,S.Sos,M.A.P

Pangkat : Penata

Nip : 19820803 200604 2 019

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

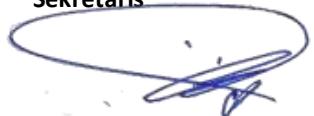
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Tim Kerja	Surat Tugas												
	b. Rapat Tim Kerja	Persiapan Penyusunan RENJA												
	C. Pengumpulan Data	Irban												
II	PELAKSANAAN													
	a. Menyiapkan sarana dan prasarana	Laptop,Kertas,Printer												
	b. Pengimputan	Penyusunan RENJA												
	c. Editin hasil Pengimputan	Tim Kerja												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Rapat Monitorin Tim Kerja	Pimpinan,Sekretari dan Irban												
	b. Pelaporan	Dokumen RENJA												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Perencanaan dan Pelaporan



SUSIMAHYANTI,SP

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 197308082002122006

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

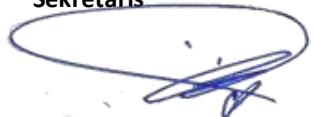
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Tim Kerja	Surat Tugas												
	b. Rapat Tim Kerja	Persiapan Penyusunan RKA												
	C. Pengumpulan Data	Irban												
II	PELAKSANAAN													
	a. Menyiapkan sarana dan prasarana	Laptop,Kertas,Printer												
	b. Pengimputan	Penyusunan RKA												
	c. Editin hasil Pengimputan	Tim Kerja												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Rapat Monitorin Tim Kerja	Pimpinan,Sekretari dan Irban												
	b. Pelaporan	Dokumen RKA												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Perencanaan dan Pelaporan



SUSIMAHYANTI,SP

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 197308082002122006

RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

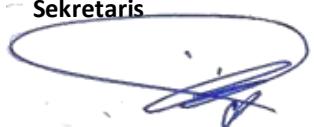
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA SKPD

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Tim Kerja	Surat Tugas												
	b. Rapat Tim Kerja	Persiapan Penyusunan Perubahan -RKA												
	C. Pengumpulan Data	Irban												
II	PELAKSANAAN													
	a. Menyiapkan sarana dan prasarana	Laptop,Kertas,Printer												
	b. Pengimputan	Penyusunan Perubahan -RKA												
	c. Editin hasil Pengimputan	Tim Kerja												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Rapat Monitorin Tim Kerja	Pimpinan,Sekretari dan Irban												
	b. Pelaporan	Dokumen Perubahan -RKA												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris



H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Perencanaan dan Pelaporan



SUSIMAHYANTI,SP

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 197308082002122006



RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Tim Kerja	Surat Tugas												
	b. Rapat Tim Kerja	Persiapan Penyusunan LAKIP												
	C. Pengumpulan Data	Irban												
II	PELAKSANAAN													
	a. Menyiapkan sarana dan prasarana	Laptop,Kertas,Printer												
	b. Pengimputan	Penyusunan LAKIP												
	c. Editin hasil Pengimputan	Tim Kerja												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Rapat Monitorin Tim Kerja	Pimpinan,Sekretari dan Irban												
	b. Pelaporan	Dokumen LAKIP												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Sekretaris

H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

Ka.Sub Perencanaan dan Pelaporan

SUSIMAHYANTI,SP

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 197308082002122006

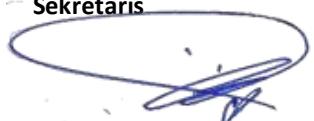
RENCANA KERJA PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

NO	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERSIAPAN													
	a. Membuat Tim Kerja	Surat Tugas												
	b. Rapat Tim Kerja	Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan												
	C. Pengumpulan Data	Irban												
II	PELAKSANAAN													
	a. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	LRA,Neraca dan CALK												
III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN													
	a. Rapat Monitorin Tim Kerja	Pimpinan,Sekretari dan Irban												
	b. Pelaporan	Dokumen Laporan Keuangan												

Polewali, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Sekretaris



Ka.Sub Keuangan dan Verifikasi

H.ARIFIN YAMBAS,S.Sos,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701229 199203 1 004

.....

.....

Terima Kasih



**INSPEKTORAT
Kabupaten Polewali Mandar**